

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH OLEH DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Universitas Islam Riau



**M. Rezky Ermansyah
NPM : 147110710**

**PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : M. Rezky Ermansyah
NPM : 147110710
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Hari/Tanggal Ujian : Kamis, 25 Maret 2021
Judul Usulan Penelitian : Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Usulan Penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik Pekanbaru, 24 Desember 2021
Ketua, Pembimbing,

Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Usulan Penelitian ini yang berjudul “Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru”. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Usulan Penelitian ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktu dan tenaganya serta memberikan izin kepada penulis dalam penelitian ini.
3. Lilis Suriani, S.Sos., M.Si Sebagai Ketua Program studi Administrasi Publik yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Usulan Penelitian ini.

4. Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si Sebagai Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Usulan Penelitian ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Penulisan Usulan Penelitian ini.
6. Kepada keluarga tercinta Ayah saya dan juga kepada Ibu saya tercinta dan juga kepada saudara-saudara saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian penulisan Penulisan Usulan Penelitian ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Administrasi Publik yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.
8. Kepada Pegawai Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dan juga Masyarakat yang tinggal disekitar kawasan permukiman kumuh yang membantu kelancaran penulis dalam memberikan data guna melengkapi Usulan Penelitian ini.

Dalam naskah Usulan Penelitian ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Usulan Penelitian

ini untuk kesempurnaan Usulan Penelitian penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Usulan Penelitian adik-adik tingkat berikutnya.

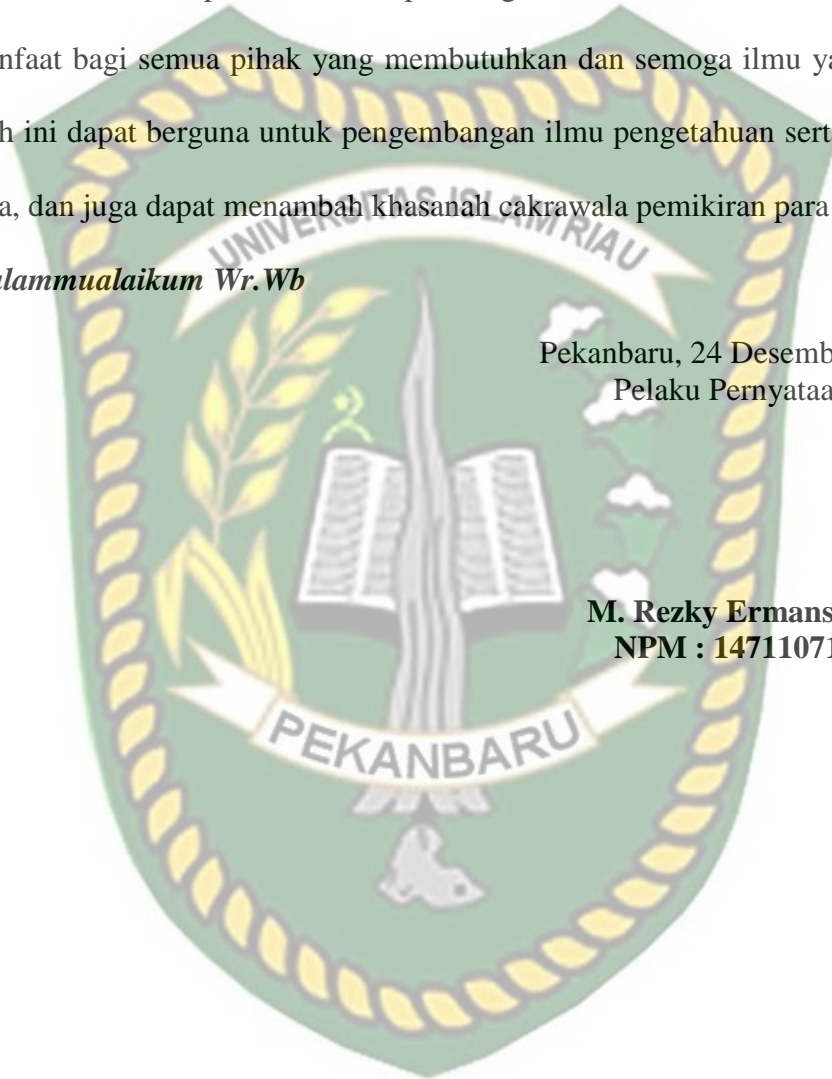
Akhir kata penulis berharap semoga Usulan Penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Wassalammualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 24 Desember 2021

Pelaku Pernyataan,

M. Rezky Ermansyah
NPM : 147110710



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan.....	8
2. Kegunaan.....	9

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan.....	10
1. Konsep Administrasi.....	10
2. Konsep Organisasi	13
3. Konsep Pemerintahan.....	16
4. Konsep Kebijakan Pemerintah.....	18
5. Konsep Pelayanan Publik.....	22
6. Konsep Evaluasi.....	24
7. Konsep Kinerja.....	32
8. Konsep Implementasi.....	39
9. Kawasan Permukiman Kumuh.....	43
B. Penelitian Terdahulu	47
C. Kerangka Pikir	49
D. Konsep Operasional	50
E. Operasional Variabel.....	53

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Key Informan dan Informan Penelitian.....	55
D. Teknik Penarikan Key Informan Dan Informan	56
E. Jenis dan Sumber Data	56
F. Teknik Pengumpulan Data.....	57

G. Teknik Analisa Data.....	59
H. Jadwal Kegiatan Peneliti	60
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	61
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	62
A. Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru	62
B. Visi dan Misi Visi.....	63
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Identitas Informan.....	66
B. Hasil Penelitian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru	68
C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru	84
BAB VI : PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR KEPUSTAKAAN	88
LAMPIRAN.....	89

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

DAFTAR TABEL

Tabel

	Halaman
I.1 : Wilayah yang Menjadi Titik Fokus Penelitian Penulis	3
I.2 : Program Penanggulangan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru	6
II.1 : Penelitian Terdahulu Terkait Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru	47
II.2 : Operasional Variable Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru	53
III.1 : Informan Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru	55
III.2 : Jadwal Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.I : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Wawancara Penelitian	89
2. Dokumentasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.....	95



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Rezky Ermansyah
NPM : 147110710
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian : Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 5 Juni 2021
Pelaku Pernyataan,

M. Rezky Ermansyah
NPM : 147110710

**PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH OLEH DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

Oleh
M. Rezky Ermansyah

Kata Kunci : Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh

Penelitian ini Untuk menganalisis Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Tipe penelitian ini adalah survey diskriptif, yaitu memprioritaskan daftar wawancara sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini dijadikan bahan utama untuk menganalisis kondisi empiris dan obyektifitas penelitian ini. Adapun informan pada penelitian ini yaitu berjumlah 8 orang. Jenis dan teknik pengumpulan data terdiri dari data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, serta data sekunder yang menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Sementara teknik analisa data yang dipergunakan adalah teknik triangulasi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik, ini dikarenakan penulis menemukan masih banyak lokasi kawasan padat penduduk yang masuk dalam kategori Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru. Kendala yang dialami Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh yaitu adalah sebagai berikut: Sosialisasi merupakan kegiatan penyuluhan. Kedua kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk petugas dilapangan. Dan Faktor penghambat yang terakhir yaitu anggaran yang terbatas sehingga membuat program yang dibuat tidak terlaksana dengan maksimal.

**IMPLEMENTATION OF CITY PROGRAM WITHOUT Slums BY THE
DEPARTMENT OF PEOPLE'S HOUSING AND SETTLEMENT AREA
PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

**By
M. Rezky Ermansyah**

Keywords: Implementation of the City Without Slums Program

This study is to analyze the implementation of the City Without Slums Program by the Department of Public Housing and Settlement Areas of Pekanbaru City and to find out the obstacles faced by the Department of Public Housing and Settlement Areas in the Implementation of the City Without Slums Program by the Department of Public Housing and Settlement Areas of Pekanbaru City. This type of research is a descriptive survey, which prioritizes the interview list as a data collection tool and the data collected with this tool is used as the main material to analyze the empirical conditions and the objectivity of this research. The informants in this study amounted to 8 people. The types and techniques of data collection consist of primary data collected using interview techniques, and secondary data using observation and documentation techniques. While the data analysis technique used is triangulation technique. Based on this analysis technique, the researchers assessed and concluded that the The implementation of the City Without Slums Program by the Department of Public Housing and Residential Areas of Pekanbaru City has not gone well, this is because the author finds that there are still many locations of densely populated areas that fall into the category of Slums in Pekanbaru City. Constraints experienced by the Department of Public Housing and Settlement Areas in the Implementation of the City Without Slums Program are as follows: Socialization is an extension activity. Second, the lack of facilities and infrastructure provided for field officers. And the last inhibiting factor is the limited budget so that the programs made are not carried out optimally.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, daerah kumuh (*slum area*) diartikan sebagai suatu kawasan pemukiman atau pun bukan kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang bangunan-bangunannya berkondisi substandar atau tidak layak yang dihuni oleh penduduk miskin yang padat. Kawasan yang sesungguhnya tidak diperuntukkan sebagai daerah pemukiman di banyak kota besar, oleh penduduk miskin yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap diokupasi untuk dijadikan tempat tinggal, seperti bantaran sungai, di pinggir rel kereta api, tanah-tanah kosong di sekitar pabrik atau pusat kota, dan di bawah jembatan.

Ciri-ciri kawasan permukiman kumuh dalam kota, dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang seperti : karakteristik fisik, sosial ekonomi, dan budaya. Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum 1993/1994, bahwa karakteristik fisik lingkungan, sosial ekonomi dan budaya pada kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

1. Perumahan yang tidak teratur.
2. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.
3. Fasilitas dan sarana lingkungan yang tidak memadai.
4. Tingkat pendapatan masyarakat rendah.
5. Sebagian besar penghuni berpenghasilan tidak tetap.
6. Tingkat pengangguran tinggi.
7. Tingkat kerawanan sosial dan angka kriminalitas cukup tinggi.

8. Masyarakat terdiri dari berbagai berbagai suku bangsa dan golongan.
9. Status lahan legal yaitu permukiman yang umumnya terletak pada area yang sesuai dengan perencanaan perkotaan, sedangkan status yang tidak legal adalah perumahan yang berada di atas lahan yang peruntukannya bukan untuk permukiman.

Kota Pekanbaru merupakan kota terbesar di Provinsi Riau dan tentunya menjadi ibu kota dari Provinsi Riau. Tetapi, walaupun sudah menjadi kota besar masih terdapat tempat-tempat permukiman kumuh. Hal ini tentunya juga menjadi sorotan bagi pemerintah Kota Pekanbaru khususnya, yang mana pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penataan pemukiman ini adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

Pada tahun 2016, melalui pemberitaan yang ada dimedia sosial dan juga media cetak, pemerintah Kota Pekanbaru sudah mencanangkan Pekanbaru akan babas dari permasalahan kawasan kumuh, tetapi kenyataannya sampai pada saat ini realisasi yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Berdasarkan SK Walikota Nomor 15/ Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 189 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, Ditetapkan bahwa luas Kawasan Kumuh yang ada di Kota Pekanbaru mencapai 113,56 Ha yang terbagi menjadi 5 (lima) Kawasan Kumuh di masing-masing daerah, dan angka tersebut dapat di katogorikan cukup besar untuk Kota Pekanbaru. (Sumber : *Website Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru*)

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian yang sedang penulis kerjakan pada saat ini, penulis memfokuskan penelitian menjadi beberapa titik yang benar-

benar menjadi tempat dan ditetapkan oleh pemerintah kota Pekanbaru sebagai lokasi kawasan kumuh di kota Pekanbaru, adapun lokasi yang menjadi kawasan kumuh yang di tetapkan oleh Walikota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 151 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru, dan lokasinya dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kampung Dalam
2. Sago
3. Kampung Bandar
4. Kampung Baru
5. Meranti Pandan
6. Sri Meranti
7. Lembah Sari
8. Limbungan
9. Limbungan Baru
10. Lembah Damai
11. Sukaramai
12. Tanah Datar Sumahilang
13. Pesisir
14. Rintis
15. Tanjung Rhu

Dari keseluruhan data di atas yang menjadi focus penelitian penulis adalah Kecamatan Senapelan, untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel I.1: Wilayah yang Menjadi Titik Fokus Penelitian Penulis

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan	Total Luas
1	Senapelan	Kampung Dalam	5.00 (Ha)	24.10 (Ha)
		Sago	1.86 (Ha)	
		Kampung Bandar	9.50 (Ha)	
		Kampung Baru	2.70 (Ha)	

Sumber: Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2018

Berdasarkan pada data di atas maka dapat dilihat bahwa kecamatan senapelan memiliki cukup luas pemukiman kumuhnya yaitu seluas 24.10 (Ha), hal inilah yang menjadi alasan penulis memilih kecamatan senapelan menjadi objek penelitian yang akan ditelusuri lebih dalam lagi.

Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan dilapangan dan dilakukan proses observasi mendalam ke wilayah terdampak yang menjadi zona kumuh disertai keterangan dari Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, adapun program kerja yang disusun oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2020 untuk mengatasi kawasan permukiman kumuh di Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel I.2 : Data Program Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

No	Program	Dana	Target
1	Pembangunan Sistem Air Bersih dan Air Minum.	Rp 667.855.410	Kecamatan Senapelan, Rumbai Pesisir.
2	Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Kawasan dan Ruang Kota	Rp 95.469.075	-
3	Penyusunan Detail Rencana Tata Ruang Kawasan.	Rp 2.360.179.000	-
4	Pembangunan Turap Kawasan Wilayah 1.	Rp 1.979.200.000	900 Meter
5	Pembangunan Infrastruktur di Jl.Kuras, Kampung Baru, Kec Senapelan.	Rp 70.000.000	APBD
6	Pembangunan Infrastruktur di Jl.Surosunto, Kampung Baru, Kec Senapelan.	Rp 100.000.000	APBD

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2020.

Berdasarkan data yang telah penulis sajikan diatas, dapat dilihat bahwa program-program yang telah di susun oleh pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah mengarah kepada perbaikan kondisi wilayah di Kota Pekanbaru agar terbebas dari kondisi kumuh.

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru selaku Dinas yang bertanggung jawab terhadap permasalahan penataan kawasan permukiman memiliki Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No. 95 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan lainnya.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
 - a. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - b. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - c. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
 - d. Perbaikan, peremajaan permukiman kumuh perkotaan.
 - e. Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru baik langsung dan tidak langsung dengan melibatkan peran serta masyarakat.

- f. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
- g. Perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat memantapkan kegiatan di bidang tugasnya.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Alasan penulis melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan terkait dengan kawasan permukiman kumuh adalah dikarenakan di dalam Tugas dan Fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, dimana diantara keseluruhan tugas dan fungsi yang telah di sajikan diatas, maka beberapa point penting yang menjadi focus peneliti terdapat pada pembahasan mengenai Pencegahan, Peningkatan Kualitas, Perbaikan dan Peremajaan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, jika dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi dilapangan saat ini, ada beberapa kawasan yang menjadi titik berkembangnya kawasan permukiman kumuh, dan hal ini lah yang mendasari penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul tentang Evaluasi Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru.

Kawasan permukiman kumuh yang berkembang di Kota Pekanbaru saat ini tentunya menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, dimana dalam pelaksanaannya dilapangan, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman mengakui telah menetapkan beberapa program pembangunan untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh di daerah kota Pekanbaru, diantaranya:

Tabel 1.3 Program Penanggulangan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.

Tahun	Jenis Program
2017	Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
	Pengelola rusunawa
	Pengembangan perumahan dan permukiman wilayah I,II,III,IV
	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
	Pemeliharaan jalan lingkungan dan drainase
	Permukiman kumuh
	Penataan dan pembangunan kawasan permukiman kumuh
	Pengendalian kawasan permukiman kumuh
2018	Stimulasi Pengembangan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
	Monitoring, evaluasi, dan pengendalian bidang Kawasan Pemukiman Kumuh
	Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman Cenderung Kumuh
	Pembangunan sarana dan prasarana
	Pengembangan Perumahan Dan Pemukiman (P2T) Wilayah III
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Skala lingkungan
2019	Pendataan dan Perencanaan
	Penataan dan Pembangunan
	Pendataan dan Pembangunan Kawasan Pemukiman Kumuh
	P2P Tahun 2018-2019
	Perencanaan Pengembangan Perumahan Dan Pemukiman (PSDG)
	P2P Jangka Pendek
	Program Stimulasi
	Pengendalian Kawasan Kumuh
	Pendataan dan Pembangunan

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan dan didukung dengan SK Walikota Nomor 15/ Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 189 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru yang telah menetapkan jumlah dan juga lokasi-lokasi kawasan kumuh yang ada di daerah Kota Pekanbaru, maka fenomenanya permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pra survey yang penulis lakukan di duga bahwa kurang terlaksananya program yang dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman khususnya dalam mengatasi pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru, hal ini dikarenakan penulis menemukan masih banyak lokasi kawasan padat penduduk yang masuk dalam kategori Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru, khususnya wilayah yang paling luas kawasan permukiman kumuhnya adalah di Kecamatan Senapelan.
2. Tidak berjalannya responsibilitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam melakukan tindakan pencegahan terkait perkembangan rumah kumuh, sehingga permukiman rumah kumuh semakin berkembang dan meluas, padahal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman telah menargetkan pembebasan Kota Pekanbaru dari permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh sejak tahun 2016, tetapi realisasi sampai pada tahun ini belum berjalan sesuai dengan apa yang telah menjadi target tersebut.
3. Responsivitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman bisa dinilai kurang baik terhadap situasi yang terjadi di Kota Pekanbaru, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya luas Kawasan Kumuh yang ada di

Kota Pekanbaru mencapai 113,56 Ha yang terbagi menjadi 5 (lima) kawasan kumuh di masing-masing daerah.

Berdasarkan penjelasan pada permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, dan didukung dengan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, maka penulis tertarik melakukan penelitian Usulan Penelitian ini dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari uraian dan penjelasan latar belakang di atas serta fenomena-fenomena yang telah disajikan di atas, maka masalah-masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru?
2. Apasaja kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru u?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dalam Pelaksanaan Program

Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

2. Adapun Kegunaan penelitian ini adalah untuk:

a. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmiah yang bersifat akademis dan menjadi sumbangsih pemikiran bagi pihak lain yang nantinya akan melakukan penelitian serupa di waktu mendatang khususnya berkaitan tentang Permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru.

b. Manfaat praktis.

Yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru di dalam melakukan tugas dan fungsinya.

D. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

Pada bab ini berisikan penguraian atau penjelasan dari pengertian, definisi, konsep dan teori yang menyangkut studi kepustakaan. Dan dilanjutkan dengan Kerangka Fikir, Konsep Operasional dan Operasionalisasi Variabel serta Teknik Pengukuran Variabel.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisikan tentang Tipe penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Penarikan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Jadwal dan Kegiatan Waktu Kegiatan Penelitian dan Rencana Sistematika Laporan Penelitian.

BAB IV: DESKRIPTIF LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran instansi yang menjadi objek penelitian, dijelaskan pula sejarah dinas dari awal berdirinya.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas analisis dalam penelitian serta berisi jawaban atas pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini hasil dalam penelitian di jelaskan secara ringkas dan merupakan inti dari kegiatan yang dilakukan dalam penelitian.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Untuk memastikan adanya unsur ilmiah dalam penelitian ini dan untuk memperjelas konsep-konsep dalam penelitian ini, berikut adalah konsep-konsep teoritis yang terkait dengan masalah dalam kaitannya dengan variabel yang diteliti untuk memecahkan masalah. Penulis mengumpulkan berbagai pendapat ahli berdasarkan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian kajian yang sulit dipadukan untuk menghasilkan hasil yang baik, antara lain sebagai berikut:

1. Konsep Administrasi

Dalam kaitannya dengan pandangan pelayanan sebagai produk suatu organisasi, istilah manajemen diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan informasi tertulis yang dibutuhkan oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu. Informasi sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan lain.

Menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli, 2005; 23), manajemen adalah seperangkat pengaturan untuk tugas utama yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Proyek utama yang direncanakan mencakup elemen manajemen umum dari sudut pandang operasional.

Menurut Benton (dalam Pirdata, 2004;2) mengatakan Administrasi berhubungan dengan penentuan kebijakan bersama dan koordinasi secara keseluruhan ada pula ahli yang menyebut administrasi sebagai pengaruh yang

efektif sementara manajemen dikatakan sebagai pelaksana yang efektif hal ini tentunya berlaku dalam lingkungan organisasi itu sendiri.

Menurut Siagian (dalam Mulyono, 2016;42), Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Sutarto (dalam Mulyono, 2016;42), Administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan/kegiatan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan.

Menurut D.White (dalam Syafri, 2012;9) Administrasi adalah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, publik atau privat, sipil atau militer, skala besar atau kecil. Pendapat ini juga menunjuk dua hal, yakni (1) Administrasi adalah proses (rangkaiannya kegiatan), (2) Proses itu terdapat pada setiap usaha.

Menurut Adams (dalam Syafri, 2012;9), Administrasi adalah kemampuan mengoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain di dalam satu organisasi sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan. Dari batasan tersebut, ditemukan ide pokok sebagai berikut:

- 1) Administrasi adalah kemampuan untuk memadukan kekuatan-kekuatan social didalam satu organisasi.
- 2) Kekuatan ini dipadukan dengan maksud agar setiap kekuatan yang ada bergerak sebagai satu kesatuan/keseluruhan organisme.

Menurut Siagian (dalam Syafri, 2012;9), Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

Menurut Atmosudirjo (dalam Syafie,2013;4), Adminstrasi merupakan suatu fenomrna sosial,yaitu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi, jadi barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terhadap organisasi.

Menurut Siagian (dalam Pasolong, 2010;3), Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Werman Siaferi (2012; 5), manajemen menggambarkan pengelolaan sekelompok orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam proses ini terdapat rencana jangka pendek, menengah, panjang dan jangka panjang serta pedoman, strategi dan upaya untuk mencapai tujuan tertentu yang perlu dicapai perusahaan.

Dengan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa manajemen ilmiah adalah cara yang sangat luas untuk mengatur hubungan antara siapa saja, terutama ketika orang-orang memiliki tujuan untuk hidupnya yang lebih baik daripada konsep manajemen untuk mencapai tujuan yang diinginkan. menggunakan. Dan konsep manajemen adalah proses partisipatif dan tidak ada yang baru karena telah ada meskipun peradaban manusia.

Berikut ini ciri-ciri Administrasi Menurut Hodgkinson (dalam Kusdi2011;7),yang dapat di pergunakan untuk mengidentifikasi administrasi publik. Selanjutnya ditegaskan lagi menurut pendapat Hanim (2005;26-127)

pentingnya peranan administrasi dalam tata kehidupan modern ialah dengan menyoroiti dampak keputusan yang diambil atau tidak diambil oleh para administrator yang merupakan manajer puncak dalam organisasi. Hal ini dikarenakan administrasi merupakan kunci bagi keberhasilan suatu organisasi, kiranya masih relevan untuk memperoleh penjelasan tentang pengertian istilah administrasi itu.

Menurut Hanif Nurcholis (2011;135) Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa, administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Ndraha (2003;508) yang dimaksud dengan administrasi pemerintahan adalah proses penjagaan (keeping dan caring) dan penyimpanan (forwading dan delivering) produk pemerintahan tertentu kepada konsumen dan memberdayakan konsumen untuk menggunakan produk tersebut dengan cara dan alat yang sesuai dengan kondisi konsumen sesegera mungkin sedemikian rupa sehingga konsumen menerimanya utuh dan sadar, dan memperoleh manfaatnya sebesar-besarnya

2. Konsep Organisasi

Organisasi adalah tempat atau tempat kegiatan orang-orang yang bekerja di sana dan tujuannya adalah untuk mencapai suatu tujuan pada saat yang bersamaan. Di dalam organisasi ada tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk membuat pekerjaan individu menjadi jelas.

Menurut Waldo (dalam Siafia, 2006; 52), organisasi adalah seperangkat struktur kekuasaan dan kebiasaan dalam hubungan antar manusia dalam suatu sistem pemerintahan.

Menurut Jan de Millet (dalam Siajian, 2006; 51), organisasi adalah suatu kerangka struktural di mana pekerjaan banyak orang diorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Menurut Siagian (dalam Tarmizi & Hendry 2015;14) Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang disebut bawahan.

Menurut Malayu (2010;23) Organisasi merupakan alat dan wadah tempat manajer melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Organisasi dapat ditinjau dari dua aspek yaitu organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan, organisasi sebagai rangkaian hierarki antara orang-orang dalam suatu ikatan formal. Sebagai wadah administrasi relative bersifat statitis, sedangkan sebagai suatu rangkaian hierarki organisasi merupakan suatu proses dengan demikian ia bersifat lebih dinamis.

“Menurut Dunsire (dalam Kusdi, 2011;5) Organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia dalam interaksinya dengan system-sistem lain aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya”.

Sukses tidaknya administrasi dan manajemen dalam melaksanakan fungsi pengorganisasiannya dapat dinilai dari kemampuannya untuk menciptakan suatu organisasi yang baik di dalam internal organisasinya, tentunya dengan kata baik tersebut adalah pada dasarnya untuk memberikan rasa puas terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat luas atau kepada penerima pelayanan yang menggunakan untuk kepentingan publik. Yang dimaksud organisasi yang baik adalah suatu organisasi yang memiliki ciri-ciri seperti yang telah dirumuskan dan di jelaskan oleh Siagian (2003;97) dan adapun ciri-ciri organisasi yang baik dapat di lihat sebagai berikut :

1. Terdapat tujuan yang jelas.
2. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang didalam organisasi.
3. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang organisasi.
4. Adanya kesatuan arah.
5. Adanya kesatuan perintah.
6. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang.
7. Adanya pembagian tugas.
8. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin.
9. Pola dasar organisasi harus relatif permanen.
10. Adanya jaminan jabatan.
11. Imbalan yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan.
12. Penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya.

Dari defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan suatu tempat dimana administrasi dijalankan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Administrasi merupakan suatu proses yang melaksanakan setiap bentuk kegiatan atau aktivitas organisasi. Ciri – ciri organisasi tersebut diterapkan sebagai

acuan dalam menjalankan setiap kegiatan – kegiatan didalam organisasi. Sehingga organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama organisasi tersebut didirikan.

Dari defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan suatu tempat dimana administrasi dijalankan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Administrasi merupakan suatu proses yang melaksanakan setiap bentuk kegiatan atau aktivitas organisasi

3. Konsep Pemerintahan

Layanan publik, pembangunan nasional, pemberdayaan dan peran pemerintah di pemerintahan pemerintah sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah harus ideal dan efektif dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi yang ditandai oleh hukum dan peraturan.

Implementasi tata kelola yang baik adalah kondisi penting bagi masing-masing pemerintah untuk mencapai ambisi sosial dan mencapai tujuan dan aspirasi di pemerintahan. Untuk mengimplementasikan akuntabilitas yang benar dan sistem malam, sehingga pemerintah dan pengembangan dapat diimplementasikan dengan baik, berhasil, penggunaan, tanggung jawab, kerja sama, perjanjian, sirkulasi, seri, Serramayanti (2004, 195)

Menurut Ndaha (2003; 6), pemerintah umumnya dipengaruhi oleh anggota dan layanan pangan untuk menangani layanan sipil untuk setiap hubungan pemerintah, yang diterima oleh seluruh masyarakat, jika perlu, sesuai dengan persyaratan berdasarkan institusi dan mereka yang berada di bawah kontrol. Adalah, diterima untuk menghakimi mereka

Menurut Ndraha (2003; 6), pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (satuan kerja) bekerja untuk memenuhi dan melindungi

keinginan (harapan dan kebutuhan) yang ditentukan oleh publik dan pelayanan publik dalam hubungan pemerintahan.

Selanjutnya Syafie (2005:36) mendefinisikan ilmu pemerintahan mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antara lembaga seta yang memerintah dengan yang diberikan perintah. Secara etimologis, definisi pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari perkataan perintah. Menurut kamus kata-kata tersebut mempunyai arti: perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah-negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).

Pemerintah dalam model lama bahan negara Caesar, selama pemerintah mencapai kekuasaan, mendapatkan posisinya, tetapi dalam model pemerintah baru sebagai objek fisik bagi masyarakat, sehingga pemerintah adalah sebagai manajemen pemerintah untuk orang-orang telah ditafsirkan. Kontrol dalam Negara Bagian / Negara (Manea, 2016: 47)

Administrasi dan pengembangan pemerintah memerlukan berbagai kebijakan dan rencana semua lembaga pemerintah. Implementasi berbagai program pengembangan saat ini dan kinerja adalah kegiatan antara bagian dan lembaga. Menurut Rasyid, pada saat yang sama, organisasi, layanan, pemberdayaan dan pengembangan organisasi. Implementasi fungsi peraturan, biasanya dikenal sebagai fungsi organisasi dalam semua bentuknya, yang berarti sebagai cuita untuk

menentukan kondisi yang tepat, sehingga dimungkinkan untuk kegiatan yang berbeda, serta menciptakan tatanan sosial yang baik untuk hidup.

Berfungsinya pelayanan akan menyebabkan pemerataan dalam masyarakat. Pemberdayaan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Ada banyak pendapat tentang bentuk pemerintahan. Menurut teori klasik, bentuk pemerintahan dapat dibagi menjadi tiga (tiga): monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Pembagiannya berdasarkan kriteria jumlah penguasa di pemerintahan Negara. Kumpulan ajaran klasik pertama kali berasal dari Herodotus dan dilanjutkan dan dikembangkan lebih lanjut oleh Plato, Aristoteles dan Polybius. Sementara bentuk pemerintahan dalam teori modern membedakan antara bentuk monarki dan republik, pembagian bentuk pemerintahan menjadi monarki dan republik pertama kali diusulkan oleh Machiavelli dalam bukunya *The Second Principle*. Dalam perkembangannya secara umum bentuk pemerintahan yang paling diterima dalam teori modern. (Monaf, 2016: 47)

4. Konsep Kebijakan Pemerintahan

Menurut Federico (dalam Augustino, 2008: 7) ia mendefinisikan politik sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang di dalamnya terdapat hambatan (masalah) dan peluang pelaksanaan politik untuk diusulkan. adalah kinerja. Tujuan khusus dari pandangan ini juga untuk menunjukkan bahwa ide kebijakan yang mencakup perilaku yang dibangun dengan tujuan merupakan bagian penting dari mendefinisikan kebijakan, karena politik pada akhirnya harus

menunjukkan apa yang sebenarnya telah dilakukan dan bukan apa yang sedang dilakukan. Siap. Sebuah masalah disarankan dalam satu aktivitas.

"Kata 'politik' sendiri masih kontroversial dan kontroversial di kalangan para ahli," kata Solichin Wahab. Al-Wahab (dalam Wahab, 2008: 40-50) menawarkan pedoman untuk memahami politik sebagai berikut:

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Winarno (2012:15) istilah politik (istilah politik) dapat digunakan secara luas dalam “politik luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang” atau digunakan secara lebih konkrit, misalnya: we use be. Anda mengatakan kebijakan pemerintah adalah memotong birokrasi dan menghilangkan kendali. Namun, orang bersenjata Abdul Wahab dan Buddy Winarno sepakat bahwa istilah politik sering digunakan sebagai pengganti istilah lain seperti tujuan program, keputusan, aturan, regulasi, standar, usulan, dan rencana besar (Suharno, 2010:11)..

Islami mengatakan (dalam Sundi, 2010:12) bahwa harus dibuat perbedaan antara politik dan akal. Politik diterjemahkan dengan politik yang berbeda, yang berarti kebijaksanaan, yang berarti kebijaksanaan. Konsep politik perlu dikaji lebih lanjut, sedangkan politik mencakup hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Anderson, dikutip dalam Islami, 1388: 17, menunjukkan bahwa politik "adalah tindakan yang tepat yang harus diikuti oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam menangani suatu masalah atau perhatian".

Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan berbagai bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh Pemerintah Pusat berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen) dan lain-lain. Sedangkan jika kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah akan melahirkan Surat Keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda) dan lain-lain. Kebijakan atau kebijaksanaan pemerintah mempunyai beberapa tingkatan yaitu :

- a. Kebijakan Nasional Yaitu kebijakan Negara yang bersifat fundamental dan strategis untuk mencapai tujuan nasional/negara sesuai dengan amanat UUD 1945 GBHN. Kewenangan dalam pembuat kebijaksanaan adalah MPR, dan Presiden bersama-sama dengan DPR. Bentuk kebijaksanaan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundangundangan dapat berupa:
 - 1) UUD 1945
 - 2) Ketetapan MPR
 - 3) Undang-Undang
 - 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dibuat oleh Presiden dalam hal kepentingan memaksa setelah mendapat persetujuan DPR.

b. Kebijakan Umum

Kebijakan yang dilakukan oleh Presiden yang bersifat nasional dan menyeluruh berupa penggarisan ketentuan-ketentuan yang bersifat garis besar dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebagai pelaksanaan UUD 1945, Ketetapan MPR maupun Undang-Undang guna mencapai tujuan nasional. Penetapan kebijakan umum merupakan sepenuhnya kewenangan presiden, sedangkan bentuk kebijakan umum tersebut adalah tertulis berupa peraturan perundang-undangan seperti halnya Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres) serta Instruksi Presiden (Inpres). Sedangkan pelaksanaan dari kebijakan umum tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan umum serta strategi pelaksanaan dalam suatu bidang tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang tertentu. Penetapan kebijakan pelaksanaan terletak pada para pembantu Presiden yaitu para Menteri atau pejabat lain setingkat dengan Menteri dan Pimpinan LPND sesuai dengan kebijakan pada tingkat atasnya serta perundangundangan berupa Peraturan, Keputusan atau Instruksi Pejabat tersebut (Menteri/Pejabat LPND).

c. Strategi Kebijakan

Merupakan salah satu kebijakan pelaksanaan yang secara hirarki dibuat setingkat Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berupa Surat Keputusan yang mengatur tatalaksana kerja dan segala sesuatu yang berhubungan dengan SDM. Pengertian strategi merupakan serangkaian sasaran

organisasi yang kemudian mempengaruhi penentuan tindakan komprehensif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan atau alat dengan mana tujuan akan dicapai. (Islamy, 2009: 17)

5. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai kegiatan individu, kelompok atau organisasi yang secara langsung atau tidak langsung memenuhi kebutuhan. Menurut Kasmir (dalam Pasolong, 2011:133), pelayanan yang baik adalah kemampuan seseorang untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan dengan kriteria tertentu. Definisi lain dari pelayanan menurut Crosby (dalam Ratminto & Winarsih, 2010: 35) Jasa adalah produk yang tidak terlihat yang melibatkan usaha manusia dan penggunaan peralatan.

Menurut Moinair (dalam Pasolong, 2011: 128), pelayanan adalah proses memuaskan kebutuhan melalui kegiatan langsung orang lain. Menurut Daviddo dan Otal (dalam Surjadi, 2012: 57) pelayanan dari setiap perusahaanlah yang meningkatkan kepuasan pelanggan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah kegiatan atau pekerjaan suatu organisasi atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Moenir (2001:13) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Tujuan pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai

pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah.

Menurut Ratminto dan Vinarsie (2012:5), pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan, baik berupa barang publik maupun pelayanan publik, yang terutama diselenggarakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan badan negara. Atau perusahaan daerah yang berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian lain dalam Al-Sarjadi (2012:7) adalah bahwa pelayanan publik adalah suatu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara dengan barang, jasa dan pelayanan administrasi penyelenggara pelayanan publik.

Selanjutnya menurut Munir (2001:13), pelayanan publik harus memuat unsur-unsur dasar sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik harus dijelaskan kepada masing-masing pihak.
2. Penyelenggaraan segala bentuk pelayanan publik harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan solvabilitasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menjaga efisiensi dan efektivitas.
3. Kualitas pelayanan publik, kinerja dan hasilnya dijamin memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum yang dapat ditafsirkan.
4. Jika pelayanan publik negara menjadi lebih mahal, penyelenggara negara yang bertanggung jawab wajib memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengaturannya.

Pelayanan Publik menurut Hopenhayn (dalam Dwiyanto, 2012:138) dikatakan sebagai kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan bervariasi sesuai dengan keragaman masyarakat yang ada. Birokrasi pemerintah dituntut untuk

mampu menyelenggarakan pelayanan yang beranekaragam karena kebutuhan masyarakatnya juga beragam.

Berdasarkan pemaparan definisi diatas, peneliti menyimpulkan pelayanan publik sebagai sekelompok organisasi yang melaksanakan pelayanan publik baik dalam bentuk pelayanan maupun jasa publik dalam memenuhi kebutuhan warga negara atau masyarakat.

6. Konsep Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses yang didasarkan pada disiplin yang ketat dan langkah-langkah waktu sehingga Anda dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang direncanakan. Selama evaluasi, hambatan atau batasan yang terjadi selama suatu kegiatan dapat diamati. Adapun kriteria/indikator Evaluasi menurut Dunn (2003:610) adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas, yaitu mengukur seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Efisiensi, yaitu seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan
- c. Kecukupan, yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
- d. Pemerataan, yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, atau nilai kelompok tertentu.
- e. Responsivitas
Jawabannya berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu dalam masyarakat.
- f. Ketepatan
Akurasi mengacu pada nilai atau nilai tujuan program dan kekuatan asumsi yang mendasari tujuan tersebut.

Dengan demikian evaluasi juga merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

Menurut Norcolis (2005:169) evaluasi adalah suatu proses yang didasarkan pada disiplin yang tepat dan langkah-langkah waktu untuk mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang direncanakan. Evaluasi dapat mengidentifikasi hambatan atau keterbatasan yang ada dalam kegiatan tersebut.

Menurut Siagian (2005: 174), evaluasi (evaluation) adalah kegiatan sadar dimana hasil yang diperoleh dan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan kenyataan. Artinya selama evaluasi harus ditentukan apakah hasil yang dicapai melebihi tujuan yang ditentukan, memenuhi harapan, atau mungkin berada di bawah tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Indra (2003:201), evaluasi adalah suatu proses dimana kriteria dan fakta dibandingkan dan hasilnya dianalisis.

- 1) Model before and after merupakan perbandingan sebelum dan sesudah operasi (behavior therapy).
- 2) Solen-das-Modell adalah perbandingan antara apa yang seharusnya ada dan apa yang sebenarnya ada.
- 3) Model kelompok kontrol – kelompok (perlakuan) dan kriterianya adalah kelompok kontrol (Nedaraha, 2003:202).

Adapun langkah-langkah Evaluasi yang dapat di lakukan menurut teori Ndraha (2003;185) adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Standar (kendali,s) beberapa standar, das solen, data sebelum terhadap data sesudah atau sebaliknya atau data tes dengan data control.
2. Memantauan factor (f)
3. Perbandingan F dan S
4. Hasil Perbandingan $F=S, F<S, FS$.
5. Analisa Perbandingan berdasarkan model-model di atas.
6. Tindak Lanjut.
 - a. Tindak Korektif
 - b. Tindak Afirmitif
 - c. Feedback.

Menurut Santoso (2004, 31) evaluasi adalah proses evaluasi yang sistematis di mana nilai-nilai dan karakteristik ditentukan, masalah dinilai dan diidentifikasi, dan solusi diberikan untuk masalah yang berkaitan erat dengan perencanaan, yang bersama-sama merupakan salah satu tugas, perencanaan. Siklus manajemen yang direncanakan

Arikunto dan Cepi (2008; 2) memberikan cara lain dalam memandang evaluasi, evaluasi kegiatan, untuk mengumpulkan informasi tentang tindakan sesuatu yang kemudian digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan atas dasar evaluasi..

Selanjutnya Winarno (2007: 230) mengemukakan enam langkah dalam Evaluasi kebijakan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di Evaluasi

- b. Analisis terhadap masalah
- c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
- d. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
- e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
- f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Duun (dalam Subarsono, 2013; 126), mencakup lima indikator yaitu:

- a. Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
- b. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkosnya. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.
- c. Kecukupan, seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah
- d. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda
- e. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuat prefensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka
- f. Ketepatan, apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

7. Konsep Kinerja

Kinerja merupakan tingkat pencapaian atau prestasi yang bisa diraih oleh pegawai atau suatu organisasi berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah

ditentukan. Mengukur keberhasilan kinerja, baik kinerja pegawai atau kinerja sebuah organisasi sangatlah diperlukan hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah diraih. Sehingga setelah diketahui bagaimana tingkat kinerja yang telah dicapai bisa dilakukan evaluasi.

Menurut Pasolong (2010: 175) konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut, dalam penelitian ini yang akan dilihat adalah kinerja pegawai Pemerintahan dalam menangani permasalahan banjir di Kota Pekanbaru.

Konsep kinerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kinerja menurut Indra Bastian (Fahmi, 2013: 128) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, fungsi, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema yang strategis (strategic planning) suatu organisasi.

Menurut Fahmi (2013: 127) kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu, sedangkan menurut Indra Bastian (Fahmi, 2013: 128) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, fungsi, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema yang strategis (strategic planning) suatu organisasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil yang diperoleh atau tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran yang tertuang dalam perumusan skema yang strategis suatu organisasi. Handayani (2004: 19) mengartikan bahwa kesuksesan adalah sarana untuk menyelesaikan tugas dan mencapai hasil. Kinerja adalah metode atau proses dimana suatu tindakan atau pekerjaan dilakukan. Prestasi juga dapat diartikan sebagai setiap gerakan sadar, perbuatan, kegiatan, atau perbuatan yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud tertentu.

a. Pengukuran Kinerja

Menurut Mahsun (2006: 26), pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja pegawai ataupun organisasi sangat penting dilakukan karena tanpa dilakukan pengukuran kinerja maka kita tidak akan tahu sejauh mana hasil yang telah dicapai oleh pegawai maupun suatu organisasi.

Menurut Wibowo (2007: 229) pengukuran hanya berkepentingan untuk mengukur apa yang penting dan relevan, untuk itu perlu jelas tentang apa yang dikatakan penting dan relevan sebelum menemukan ukuran apa yang harus digunakan. Hal-hal yang diukur tergantung pada apa yang dianggap penting oleh

stakeholders dan pelanggan. Pengukuran mengatur keterkaitan antara strategi berorientasi pelanggan dan tujuan dengan tindakan.

Dalam mengukur kinerja pegawai ataupun kinerja organisasi diperlukan indikator pengukuran kinerja, karena indikator merupakan acuan dan juga pedoman dalam melakukan pengukuran kinerja. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa indikator dalam mengukur kinerja.

Mengukur kinerja pegawai dapat dilakukan melalui indikator kinerja, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui optimal atau tidaknya suatu hasil yang dicapai. Menurut Dwiyanto (Pasolong, 2012: 178-179) indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja yaitu sebagai berikut :

- a. Produktivitas, bahwa produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan dan pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dan output.
- b. Kualitas layanan, cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik pada kualitas.
- c. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- d. Responsibilitas, yaitu menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan kebijakan birokrasi baik yang eksplisit maupun yang implisit.

- e. Akuntabilitas, maksudnya bahwa seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi tunduk kepada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, dimana para pejabat politik tersebut dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan rakyat.

Sementara menurut Kumorotomo (Pasolong, 2012: 180) indikator kinerja untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja birokrasi publik, antara lain:

- a. Efisiensi, Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan.
- b. Efektivitas, Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan.
- c. Keadilan, Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau keadilan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan pada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini.

- d. Daya Tanggap, Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.

Menurut Mahmudi (2010: 155-156), indikator kinerja merupakan sarana atau alat (means) untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan atau proses dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri (ends). Peran indikator kinerja bagi pegawai ataupun organisasi sektor publik adalah memberikan tanda atau rambu-rambu bagi manajer atau pihak luar untuk menilai kinerja organisasi.

Widodo (2006:78) mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Menurut Armstrong dan Baron (Wibowo, 2011: 100), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu sebagai berikut:

- a. *Personal factor*, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi dan komitmen individu.
- b. *Leadership factor*, ditentukan oleh kualitas, dorongan, bimbingan dan dukungan yang dilakukan manajer dan team leader.
- c. *Team factor*, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja.
- d. *System factor*, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan oleh organisasi.

- e. *Contextual/situational factor*, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Dari pendapat ahli di atas dapat dilihat ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dari kinerja seorang pegawai adalah tingkat keterampilan dan kompetensi yang dimiliki. Jika seorang pegawai memiliki tingkat keterampilan dan kompetensi yang tinggi maka kinerja dari pegawai juga akan baik. Begitu pula sebaliknya apabila tingkat keterampilan dan kompetensi pegawai rendah maka kinerjanya juga rendah.

8. Konsep Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

(Meter dan Horn dalam Wahab, 2004:65)

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab adalah:

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”(Webster dalam Wahab, 2004:64).

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut: Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.(Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab, 2004:68).

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002:102) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2008:68) juga mendefinisikan implementasi yang merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya

dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.

Implementasi merupakan langkah dalam proses pengambilan keputusan politik. Implementasi biasanya terjadi setelah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah serangkaian kegiatan untuk mempresentasikan kebijakan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan hasil yang diharapkan (Afan Jafar, 2009: 295).

Menurut Augustino (2010:139), implementasi adalah suatu proses dinamis dimana pembuat kebijakan melakukan suatu kegiatan atau kegiatan untuk pada akhirnya mencapai suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri. Sedangkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983: 139) menjelaskan bahwa implementasi berarti pelaksanaan keputusan-keputusan politik yang mendasar, kebanyakan berupa undang-undang, tetapi juga berupa perintah-perintah, keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan-keputusan yudikatif. . Biasanya, keputusan mengidentifikasi masalah yang harus dipecahkan, tujuan yang ingin dicapai, dan dengan jelas menguraikan berbagai cara di mana proses implementasi terstruktur atau terorganisir.

Implementasi adalah perluasan kegiatan yang mengadaptasi proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut dan membutuhkan jaringan manajer dan birokrasi yang cakap (Stiavan, 2004: 39). Pada akhirnya, eksekusi disebabkan oleh aktivitas, tindakan, prosedur, atau mekanisme sistem. Pelaksanaan bukan sekedar kegiatan, melainkan kegiatan yang direncanakan dan tercapainya tujuan kegiatan” (Osman, 1381: 70).

Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. 1. Komunikasi, d. H. Keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan mengharuskan pelaku untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, karena tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada khalayak yang dituju untuk mengurangi gangguan implementasi.
2. 2. Sumber Daya Meskipun isi pedoman dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, implementasinya tidak efektif jika pelaksana tidak memiliki sumber daya untuk mengimplementasikannya. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia seperti efisiensi point of sale dan sumber daya keuangan. 3. Karakter adalah watak dan sifat-sifat pelaku, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Ketika moderator dalam suasana hati yang baik, ia dapat melakukan politik seperti yang diinginkan politisi. Jika implementor memiliki sikap atau pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak akan efektif.
3. 4th Struktur Birokrasi Struktur birokrasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Aspek struktur birokrasi meliputi Standard Operating Procedure (SOP) dan segmentasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menciptakan prosedur birokrasi, yaitu prosedur birokrasi yang kompleks dan membuat kegiatan organisasi menjadi tidak fleksibel.

9. Kawasan Permukiman Kumuh

Pemukiman sering disebut perumahan dan atau sebaliknya. Pemukiman berasal dari kata *housing* dalam bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan dan kata *human settlement* yang artinya pemukiman. Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana ligkungannya. Perumahan menitikberatkan pada fisik atau benda mati, yaitu *houses* dan *land settlement*, sedangkan pemukiman memberikan kesan tentang pemukim atau kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan, sehingga pemukiman menitikberatkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia (human). dengan demikian perumahan dan pemukiman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya, pada hakekatnya saling melengkapi.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tidak mengenal adanya istilah kawasan kumuh, yang ada Permukiman kumuh dan Perumahan kumuh. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Sedangkan Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Permukiman kumuh sering dilihat sebagai suatu kawasan yang identik dengankawasan yang apatis, kelebihan penduduk, tidak mencukupi, tidak memadai,

miskin, bobrok, berbahaya, tidak aman, kotor, di bawah standar, tidak sehat dan masih banyak stigma negatif lainnya (Adisasmita, 2010:112).

Dari beberapa kesan yang timbul dari permukiman kumuh dapat disimpulkan definisi dari permukiman kumuh itu sendiri, terdapat beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ahli, berikut penjelasannya: *Permukiman kumuh yaitu permukiman yang padat, kualitas konstruksi rendah, prasarana, dan pelayanan minim adalah pengejawantahan kemiskinan* (Kuswartojo,2005:45).

Sedangkan menurut Suparlan (2009:118), Permukiman kumuh adalah permukiman atau perumahan orang-orang miskin kota yang berpenduduk padat, terdapat di lorong-lorong yang kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan, juga biasa disebut dengan wilayah pencemaran atau semerawut, permukiman kumuh dapat diartikan menjadi dua bagian, yang pertama ialah kawasan yang proses pembentukannya karena keterbatasan kota dalam menampung perkembangan kota sehingga timbul kompetisi dalam menggunakan lahan perkotaan. Sedangkan kawasan permukiman berkepadatan tinggi merupakan embrio permukiman kumuh. Dan yang kedua ialah kawasan yang lokasi penyebarannya secara geografis terdesak perkembangan kota yang semula baik, lambat laun menjadi kumuh, yang menjadi penyebabnya adalah mobilitas sosial ekonomi yang stagnan.

b. Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh

Karakteristik permukiman kumuh seringkali digambarkan dan identik sebagai kawasan perumahan yang digambarkan memiliki lingkungan yang tidak teratur, kotor, kurang sehat, tidak estetis yang keadaanya tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota, serta berkaitan erat dengan kemiskinan. Menurut Soestrisno

(1998:118), secara umum lingkungan permukiman yang dikategorikan sebagai permukiman kumuh, adalah lingkungan perumahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a) Kondisi fisik lingkungannya tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan.
- b) Kondisi bangunan yang sangat buruk serta bahan bangunan yang digunakan adalah bahan bangunan semi permanen.
- c) Kepadatan bangunan dengan koefisien dasar bangunan (KDB) lebih besar dari yang diizinkan, dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi yang lebih dari 500 jiwa/ha.
- d) Fungsi – fungsi rumah yang bercampur tidak jelas.

Lebih lanjut Soetrisno (1998:119) mengatakan bahwa lingkungan permukiman kumuh dibagi dalam lima kategori, berdasarkan pola lokasinya yaitu:

- a) Lingkungan perumahan kumuh yang berada di lokasi strategis dalam mendukung fungsi kota yang menurut rencana kota dapat dibangun bangunan komersial.
- b) Lingkungan permukiman kumuh yang lokasinya kurang strategis dalam mendukung fungsi kota.
- c) Lingkungan perumahan kumuh yang berada di lokasi yang menurut rencana kota tidak untuk perumahan.
- d) Lingkungan perumahan kumuh yang berada di lokasi yang berbahaya, yang menurut rencana kota disediakan untuk jalur pengaman seperti batasan sumgai, jalur jalan kereta api dan jalur listrik tegangan tinggi.
- e) Lingkungan perumahan kumuh yang berada di lokasi yang menurut rencana kota boleh dibangun untuk perumahan.

Ciri-ciri kawasan permukiman kumuh dalam kota, dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang seperti, karakteristik fisik, sosial ekonomi, dan budaya. Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum 1993/1994, mengatakan bahwa karakteristik fisik lingkungan, sosial ekonomi dan budaya pada kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

- a. Perumahan yang tidak teratur.
- b. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.
- c. Fasilitas dan sarana lingkungan yang tidak memadai.
- d. Tingkat pendapatan masyarakat rendah.
- e. Sebagian besar penghuni berpenghasilan tidak tetap.
- f. Tingkat pengangguran tinggi.
- g. Tingkat kerawanan sosial dan angka kriminalitas cukup tinggi.
- h. Masyarakat terdiri dari berbagai suku bangsa dan golongan.
- i. Status lahan legal yaitu permukiman yang umumnya terletak pada area yang sesuai dengan perencanaan perkotaan, sedangkan status yang tidak legal adalah perumahan yang berada di atas lahan yang peruntukkannya bukan untuk permukiman.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu Terkait Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

1	Nama	:	Ruli As'ari & Siti Fadjarajani
	Judul Penelitian	:	Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan.
	Variabel Penelitian	:	Penataan Pemukiman Kumuh.
	Fenomena Penelitian	:	Fenomena yang di temukan oleh penulis terdahulu adalah ditemukannya permasalahan terkait dengan kondisi lingkungan yang antara lain seperti jarak antara rumah berhimpitan, Luas rumah yang sangat sempit (rata-rata hanya 3-4 bata), sebagian besar rumah tidak ada sekat antara kamar tidur dengan ruang tamum ruang keluarga, dan dapur, serta tidak memiliki MCK pribadi.
	Konsep Penelitian	:	Kinerja organisasi menurut Chaizi Nasucha (2004 : 107) adalah Efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui suatu usaha sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus mencapai kebutuhannya secara efektif.
	Indikator Penelitian	:	Dwiyanto (dalam Pasolong, 2008:50) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu : 1) Produktivitas. 2) Kualitas Layanan. 3) Responsivitas. 4) Responsibilitas. 5) Akuntabilitas
2	Nama	:	Wilko Rahmad Zulkarnaini, Elfindri Elfindri, Delfia Tanjung Sari
	Judul Penelitian	:	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permukiman Kumuh di Kota Bukittinggi

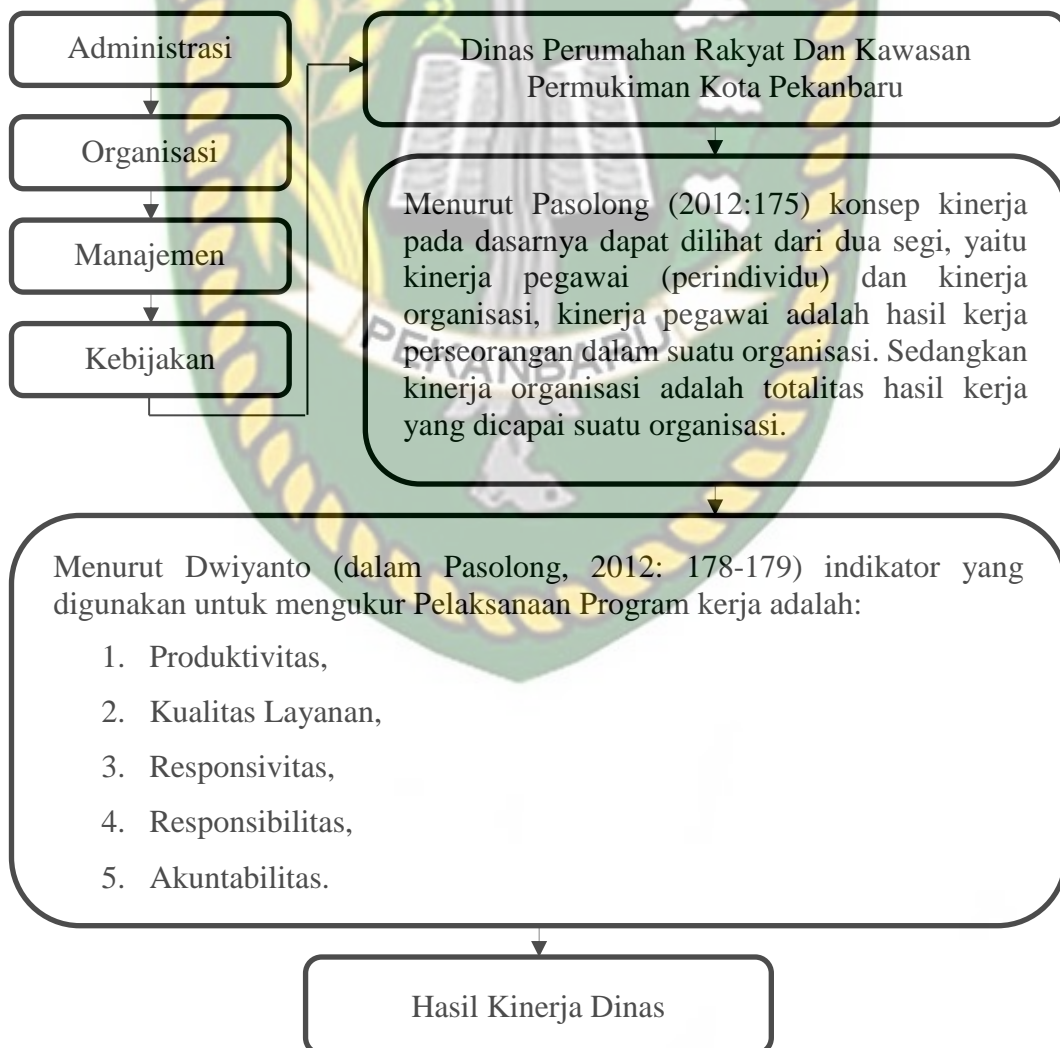
Variabel Penelitian	:	Pengaruh Permukiman Kumuh Di Bukittinggi
Fenomena Masalah	:	Perkembangan kota tidak selalu menimbulkan dampak positif, namun memiliki dampak negatif diantaranya munculnya kawasan permukiman kumuh di sekitar pusat kota. Di sekitar pusat kota memiliki berbagai pusat kegiatan diantaranya pariwisata, kesehatan, pendidikan dan perdagangan serta jasa baik di lingkup kota, provinsi maupun nasional. Kelima kegiatan tersebut berkembang dengan cukup pesat yang mengakibatkan berkembang kawasan permukiman di sekitar pusat kota dan buruknya berkembang permukiman kumuh di lokasi tersebut.
Konsep Penelitian	:	Teori kebutuhan dasar manusia menurut Maslow memiliki kaitannya dengan skala prioritas kebutuhan hidup dan keutamaan dari kebutuhan perumahan dengan melihat dari kondisi ekonomi seseorang. Oleh karena itu, pada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan sangat rendah memprioritaskan faktor jarak antar lokasi rumah ke tempat kerja. Prioritas kedua yaitu faktor legalitas kepemilikan rumah dan lahan serta yang menjadi prioritas paling bawah dari faktor kualitas dan bentuk bangunan (Turner, 1982).
Indikator Penelitian	:	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Bangunan; • Kepadatan Bangunan; • Pendapatan Rumah Tangga; • Pekerjaan Kepala Rumah Tangga; • Pendidikan Terakhir Kepala Rumah Tangga. • Aksebilitas Jalan.

Sumber : *Olahan Data Penulis, Tahun 2021*

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini sangat di perlukan untuk menspesifikasikan penelitian, agar tujuan dan maksud dari penelitian ini dapat di bahas dengan mudah dan di pahami dengan baik, dan mempermudah bagi peneliti untuk menentukan indikator penelitian dan sumber dari indikator dapat tertera dengan jelas. Adapun kerangka pikirannya dapat dilihat pada gambar II.1 di bawah ini:

Gambar II.1: Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.



Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2021.

D. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat diukur sesuai dengan realita. Hal ini untuk mempermudah dalam melakukan penelitian dalam mencari sumber-sumber referensi. Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, maka perlu peneliti menyusun konsep operasional dalam penelitian ini, dan konsep operasionalnya adalah sebagai berikut :

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan organisasi sebagai tempat atau tempat untuk melakukan kegiatan guna mencapai tujuan yang efektif dan efisien.
2. Organisasi adalah salah satu tempat yang harus Anda miliki dan berperan penting. Tanpa regulasi, mustahil ada rencana, meski tidak di lingkungan pemerintah, yang ditujukan untuk otonomi daerah. Organisasi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan berbagai orang dalam rangka mencapai tujuan, baik itu tujuan individu maupun tujuan bersama dalam suatu kelompok.
3. Manajemen adalah proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, mobilisasi dan litigasi yang dilakukan melalui penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

4. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni manajemen hubungan dan peran tenaga kerja dalam membantu perusahaan, karyawan dan masyarakat agar efektif dan efisien.
5. Evaluasi adalah kajian terhadap pelaksanaan suatu program yang dilaksanakan dan digunakan untuk memprediksi, menghitung dan mengontrol pelaksanaan program yang akan datang dengan lebih baik. Evaluasi lebih prospektif daripada kesalahan masa lalu dan tampaknya meningkatkan kemungkinan keberhasilan program. Oleh karena itu, tugasnya adalah mengevaluasi perbaikan atau review program di masa yang akan datang.
6. Ketertiban umum adalah keputusan pemerintah, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk mencapai tujuan pemerintah yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengorganisir masyarakat dalam masa pertumbuhan, membawa masyarakat ke dalam transisi, dan mencapai masyarakat yang dicita-citakan.
7. Prestasi adalah pekerjaan yang dapat dilakukan seseorang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kinerja adalah seperangkat perilaku yang terkait dengan tujuan bisnis.
8. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena perkembangan yang tidak teratur, kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan, sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Produktivitas, dimana produktivitas mengukur tidak hanya tingkat efisiensi tetapi juga efektivitas pelayanan dan secara umum dipahami sebagai hubungan antara input dan output.
- b. Kualitas pelayanan seringkali penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak opini negatif yang terbentuk tentang lembaga pemerintah bersumber dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitasnya.
- c. response, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun program dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- d. Tanggung jawab berarti memperjelas bahwa kegiatan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan pedoman birokrasi yang tepat, baik secara eksplisit maupun implisit.
- e. Akuntabilitas berarti sejauh mana pedoman dan kegiatan birokrasi mengikuti pejabat politik terpilih, karena pejabat politik tersebut secara otomatis memprioritaskan kepentingan rakyat.

E. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variable Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

Konsep Teori	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Item Penilaian
1	2	3	4
Menurut Pasolong (2014:175) konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi, kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.	Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.	• Produktivitas	a. Penyusunan Program Kerja Dinas Bidang Penanganan Kawasan Kumuh. b. Ketersediaan Anggaran Kerja Program.
		• Kualitas layanan	a. Pelaksanaan Program Berjalan Sesuai Rencana. b. Dampak Program Berhasil Mengurangi Kawasan Kumuh.
		• Responsivitas	a. Dinas Peka terkait perkembangan pemukiman Ilegal di Kota Pekanbaru. b. Melakukan Tindakan Pencegahan Terhadap Rumah Kumuh Baru.
		• Responsibilitas	a. Dinas Melakukan Evaluasi Terhadap Kondisi Dilapangan Setiap Tahun. b. Mengambil Tindakan Terkait Hasil Evaluasi Kerja.
		• Akuntabilitas	a. Melakukan Relokasi atau Penggusuran. b. Melakukan Tindakan Sanksi Terhadap Masyarakat Yang Mendirikan Bangunan Ilegal.

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2021.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2010: 4), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, dan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Creswell (2010: 20) menerangkan bahwa metodologi kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain: penelitian partisipatoris, analisis wacana, etnografi, grounded theory, studi kasus, fenomenologi, dan naratif.

B. Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini terletak di Kota Pekanbaru.
2. Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, dimana kantor tersebut beralamat di Jl.Parit Indah / Jl.Datuk Setia Maharaja No.6, Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28289.

Alasan yang mengiring peneliti untuk melakukan penelitian di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru adalah berdasarkan

fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, dimana penulis menemukan permasalahan berdasarkan hasil pra observasi yang telah dilakukan dan ditemukan beberapa permasalahan terhadap kondisi sosial yang berkaitan dengan kawasan permukiman yang tidak layak huni di Kota Pekanbaru.

E. Key Informan dan Informan

Penunjukan informan dengan prosedur purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang mejadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu, (Bungin 2007: 107). Informan Penelitian adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Key informan atau disebut dengan informan utama, merupakan seseorang yang memang ahli di bidang yang akan diteliti. Adapun *informan* dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel di bawah:

Tabel III.1 : Informan Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

No	Jabatan / Status Informan	Status Informan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru.	Key Informan	1
2	Kepala Subbag Penyusunan Program Kerja Dinas.	Informan	1
3	Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Kota Pekanbaru.	Informan	1
4	Masyarakat Yang Tinggal Dikawasan Kumuh Kota Pekanbaru	Informan	5
Jumlah			8

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2021

F. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan

Untuk penarikan sampel dalam menentukan key informan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik sampling, menurut Arikunto (2010:134) menjelaskan “Sampling jenuh ialah teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus”.

Sementara itu, untuk penarikan informan maka penulis menggunakan teknik penarikan sampel yaitu dengan cara “*Snowball Sampling*” dimana menurut Sugiyono, (2016:85). *Snowball Sampling* adalah tehnik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *Snowball Sampling* untuk mencari informasi yang lebih akurat.

G. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa sumber yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diambil langsung melalui observasi secara langsung berupa wawancara terhadap *key informan* dan *informan* sebagai sumber data penelitian. Pengambilan data menggunakan mata untuk mengamati sesuatu tanpa pertolongan alat bantu lainnya. Dalam data primer ini *key Informan* penelitian yaitu Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru, Kepala Subbag Penyusunan Program Kerja Dinas, Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Kota Pekanbaru, dan Masyarakat Sekitar Kawasan.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Kantor Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian seperti :

- a. Sejarah singkat Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian.
- c. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru.
- d. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

H. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut

a. Observasi

Menurut Creswell (2016: 254) Observasi adalah ketika penelitian langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, penelitian merekam/mencatat-baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti. Aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam,

mulai dari sebagai non-partisipan hingga utuh. Pada umumnya observasi ini bersifat open-ended di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.

b. Wawancara (*interview*)

Menurut Creswell (2016:254) Peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opinin dari para partisipan. Dan langkah-langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adalah:

- 1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan.
- 3) Mengawali atau membuka alur wawancara yang akan dilakukan.
- 4) Melaksanakan alur wawancara.
- 5) Mengkonfirmasi hasil wawancara dan mengakhirinya.
- 6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
- 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini, peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, e-mail)

I. Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono (2014:428) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis dengan bantuan teknik pengolahan data dan analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam definisi masalah.

Menurut Sugiyono (2014:206), analisis data berarti: analisis data adalah suatu kegiatan dimana data dikumpulkan dari semua informan. Kegiatan dalam analisis data adalah mengumpulkan data berdasarkan variabel dan jenis buletin, mengekstrak data berdasarkan variabel dari semua informan, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan.

Keputusan analisis data membutuhkan data yang akurat dan terpercaya yang nantinya dapat digunakan dalam penelitian penulis. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dengan cara yang mudah dibaca, dipahami, dan ditafsirkan.

J. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Penelitian Tentang Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru

Jenis Kegiatan	Jadwal Penelitian Tahun 2019/2020																							
	April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal																								
Ujian Proposal																								
Revisi Proposal																								
Kuisisioner																								
Rekomendasi survey																								
Survey Lapangan																								
Analisis data																								
Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																								
Konsultasi Revisi Skripsi																								
Ujian Konferehensif Skripsi																								
Revisi Skripsi																								
Pengandaan Skripsi																								

Sumber : Data Olahan Penulis, Tahun 2021

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota Pekanbaru

Pekanbaru terletak antara 1010 14 '1010 34' Longude En 00 25 ' - 0 05' 'Nort Latitude. Menurut Rencana Pemerintah 1987, 1987 (7 September 1987), kota Picanbaro telah berkembang dari 62.96 kilometer persegi menjadi 446,50 kilometer persegi, termasuk 12 area di bawah dan 45 desa. Tetapi dari hasil pengukuran atau kapal di tingkat nasional pertama, beragam 632,26 km², kota Picanbaro adalah ibu kota dan kota terbesar di Rio County. Kota ini adalah salah satu ekonomi ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatra, termasuk jalur pertumbuhan yang tinggi, migrasi dan perkotaan perkotaan. Kota ini telah dimulai dari pasar (seminggu), didirikan oleh Mingkapau bagi pedagang di Seks Banks pada abad kedelapan belas. Ulang tahun kota Picabaro pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan Dewan CIC, yang terdiri dari suku Datok dari empat strain pesisir (pantai, Limapolo, Desire dan Camp). Kota Piknaru dengan cepat tumbuh dengan perkembangan industri minyak, serta implementasi kemerdekaan

Kantor perumahan PICNBARRO dan area pemukiman Picanbaro dalam Peraturan Daerah Regional 9 pada 2016 dalam pembentukan organisasi regional di Painburu, tugas memegang urusan negara bagian di perumahan dan daerah perumahan adalah untuk membantu Walikota Pekanbaru di daerah.

Pengaturan, kantor perumahan publik dan area pemukiman kota Pikanbaro berdasarkan Presiden Pekanbaru Nomor 95 sejak 2016 tentang posisi dan struktur

organisasi, tugas, pekerjaan dan metode kerja di kota Pekanbaru County dan kawasan perumahan perangkat keras unit kerja adalah Regional. Perumahan dan pemukiman..

B. Visi dan Misi Visi :

Visi

“Terwujudnya infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang handal, dan berkelanjutan menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera”.

Misi :

1. Meningkatkan efektifitas,efisiensi dan akuntabilitas pelayanan internal dan eksternal.
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci lainnya di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
3. Meningkatkan kualitas tempat bermukim dan berusaha masyarakat melalui pecegahan dan pengendalian kawasan kumuh perkotaan.
4. Memfasilitasi dan mendorong terciptanya iklim yang kondusif di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
5. Meningkatkan ketersediaan dan layanan rumah layak huni yang terjangkau.
6. Meningkatkan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung sarana dan prasana dan utilitas umum

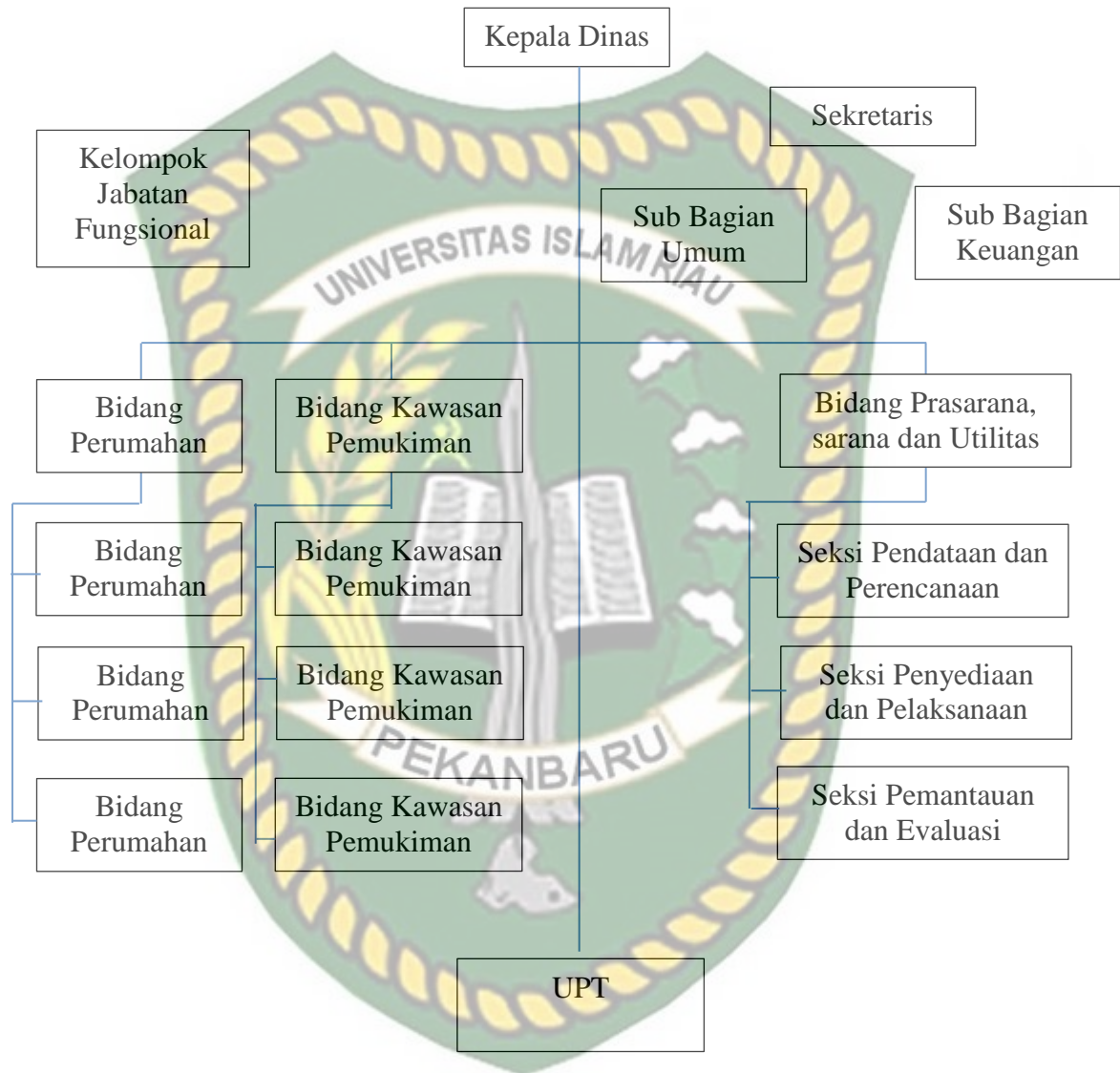
C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi didefinisikan sebagai “sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya dan ke mana ia melapor ke dalam organisasi.” Suatu struktur kemudian dikembangkan untuk menetapkan bagaimana organisasi beroperasi untuk melaksanakan tujuannya. Ada banyak jenis struktur organisasi. Setiap struktur organisasi memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda dan hanya dapat berfungsi untuk organisasi atau organisasi dalam situasi tertentu atau pada titik tertentu dalam siklus hidupnya.

Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hirarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya dan ke mana ia melapor ke dalam organisasi. Struktur ini dikembangkan untuk menetapkan bagaimana bisnis beroperasi dan membantu usaha dalam mencapai tujuannya untuk memungkinkan pertumbuhan di masa depan. Struktur diilustrasikan menggunakan bagan organisasi. Struktur organisasi juga menentukan bagaimana informasi mengalir antar level dalam organisasi. Misalnya, dalam struktur terpusat, keputusan mengalir dari atas ke bawah, sedangkan dalam struktur desentralisasi, kekuatan pengambilan keputusan didistribusikan di antara berbagai tingkatan organisasi.

Perencanaan struktur memastikan ada cukup sumber daya manusia dengan keterampilan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi, dan memastikan bahwa tanggung jawab ditetapkan dengan jelas. Setiap orang memiliki deskripsi pekerjaan yang menguraikan tugas, dan setiap pekerjaan menempati posisinya sendiri di bagan organisasi.

Adapun tugas pokok pada masing-masing Bagian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:



1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan lainnya.

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan dan kawasan permukiman.
3. pembinaan dan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman.
4. pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan dan permukiman.
5. penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangannya.
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.
 2. Perencanaan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi.
 3. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
 4. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
 5. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
 6. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
 7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perumahan

1. Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perumahan.
2. Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pendataan dan perencanaan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - d. Penelitian kondisi alam setempat dan penguasaan teknologi yang dapat diterapkan untuk pembangunan perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - e. Penyiapan data kondisi perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya yang diperhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan, lingkungan perumahan termasuk prasarana, sarana dan fasilitas yang ada.
 - f. Pemberian pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.

- g. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengembangan perumahan, bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- h. Pelaksanaan pengkajian pengembangan perumahan yang meliputi rencana penataan dan pengembangan kawasan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya melalui kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun dengan memperhatikan sosial budaya serta fasilitas pembiayaan yang mendukung pengembangan perumahan.
- i. Pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya dan atau peningkatan kualitas perumahan.
- j. Penyampaian informasi mengenai kebijakan, strategi dan program pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- k. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dan pengelolaan rumah susun (rumah khusus, rumah umum, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya yang dibangun oleh pemerintah dari dana APBN, APBD ataupun swasta.
- l. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian

izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- m. Penyediaan/pelaksanaan fasilitasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil.
- n. Penerbitan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah dan perumahan.
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kawasan Permukiman

1. Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan kawasan permukiman.
2. Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.
 - b. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan penyusunan program kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan tugasnya.
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan bahan-bahan dan kegiatan dalam rangka pembinaan umum, penyuluhan, pengaturan, bimbingan teknis, pelaksanaan, pengawasan bidang kawasan permukiman.

- e. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan usulan rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kawasan permukiman.
- f. Penyusunan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh diwilayah kota.
- g. Pelaksanaan perbaikan, peremajaan permukiman kumuh perkotaan.
- h. Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan petunjuk teknis kegiatan kawasan permukiman.
- i. Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan bimbingan dalam rangka kegiatan kawasan permukiman.
- j. Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengendalian kawasan permukiman.
- k. Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang permukiman.
- m. Pencegahan timbulnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- n. Penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- o. Pemanfaatan dan mengendalikan kawasan permukiman.

- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

1. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
2. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - c. Penyusunan rencana teknik di bidang penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - d. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman,

jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.

- e. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan lahan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. UPT dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :
 - a. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
3. Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang, yang terdiri dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru, Kepala Subbag Penyusunan Program Kerja Dinas, Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Kota Pekanbaru dan Masyarakat Yang Tinggal Di kawasan Kumuh Kota Pekanbaru sebanyak 5 orang. Identitas informan berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai informan yang terdiri dari jenis kelamin, umur informan, dan tingkat pendidikan.

1. Jenis Kelamin

Pada identitas informan jenis kelamin dalam penelitian Analisis Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, terdiri dari satu jenis kelamin saja yaitu jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional informan yang bersangkutan didalam bekerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1 : Distribusi Identitas Informan berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Informan	Persentase
1	Laki-Laki	6	75%
2	Perempuan	2	25%
Jumlah		8	100%

Sumber : Data olahan Penelitian, 2021

Berdasarkan Dari tabel V.1 diatas dapat diketahui informan dalam penelitian ini tentang Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru, Kepala Subbag Penyusunan Program Kerja Dinas, Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Kota Pekanbaru dan Masyarakat Yang Tinggal Dikawasan Kumuh Kota Pekanbaru terdiri dari 8 orang jenis kelamin laki-laki (75%) dan kelamin perempuan (25%).

2. Tingkat Umur

Tingkat umur informan sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam bertindak dan berpikir dalam rangka mengambil suatu keputusan. Untuk lebih jelasnya mengenai umur informan dalam penelitian Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.2 : Distribusi Identitas Informan Berdasarkan Tingkat umur.

No	Umur	Informan	Persentase
1	≤ 30 tahun	2	25,0%
2	30 - 39 tahun	5	62,5%
3	≥ 40 tahun	1	12,5%
Jumlah		8	100%

Sumber: Data olahan penelitian, 2021

Dari tabel V.2 diatas terlihat bahwa informan penelitian Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru pada tingkat umur terbanyak ialah pada umur 30 - 39 tahun yaitu berjumlah 5 orang informan atau 12.5%,

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan tidak bisa di dapat begitu saja melainkan melalui beberapa tahapan baik dari sekolah, lingkungan maupun keluarga. Kemudian untuk penggolongan informan penelitian berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.3 : Distribusi Identitas Informan Penelitian Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kota Pekanbaru.berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No.	Tingkat pendidikan	Informan	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA/SLTA	4	50,0%
4	Diploma	1	12,5%
5	Sarjana	2	25,0%
6	Pascasarjana	1	12,5%
	Jumlah	8	100%

Sumber: Data olahan penelitian, 2021

Dari tabel V.3 diatas terlihat bahwa pada informan penelitian didominasi oleh tingkatan pendidikan SMA/SLTA atau sederajat yaitu berjumlah 6 informan dengan persentase 50%. Setelah menjelaskan dan menggambarkan kondisi informan melalui indentitas jenis kelamin, umur dan tingkatan pendidikan selanjutnya akan dilakukan pembahasan mengenai hasil penelitian.

B. Hasil Penelitian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

Kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang sesuai dengan tugas dan fungsinya. kinerja merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Menurut Pasolong (2012:175) konsep kinerja pada dasarnya

dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi, kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.

Berdasarkan data observasi yang diperoleh, maka peneliti menemukan tanda-tanda kurang terlaksananya Program Islam Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, menurut Pasolong (2014:175) ada lima hal, diantaranya: (a). produktivitas, (b). Kualitas Pelayanan, (c). Responsivitas, (d). Responsibilitas, dan (e). Akuntabilitas.

a. Produktivitas

Produktivitas, bahwa produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan dan pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dan output. Berkenaan pelaksanaan program kerja Dinas Bidang Penanganan Kawasan Kumuh untuk mengatasi permasalahan di Kota Pekanbaru, maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Bidang Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekanbaru sebagai informan, beliau mengatakan:

“Dalam peningkatan program kerja, kegiatannya pembangunan fisik. Salah satu contohnya mck (kamar mandi dan toilet) yang harus diperbaiki. Kemudian atap rumah yang jebol yang harus dibantu. Kita berikan bantuan material untuk mereka. Baik itu pasir, batu bata, semen atau bahan yang mereka butuhkan untuk bisa memperbaiki rumah atau tempat tinggal mereka. Supaya bisa ditempati dengan nyaman.” (Wawancara November 21)

Berdasarkan informasi dari informan 1 mengungkapkan bahwa salah satu program adalah pentaan dan pengendalian kawasan kumuh. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi tempat tinggal masyarakat dipermukiman kumuh agar memiliki tempat tinggal yang layak. Program pengembangan perumahan merupakan respon dari pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selaku penyelenggara dalam penataan permukiman kumuh di kota Pekanbaru.

Kemudian peneliti mewawancarai Kepala Subbag Penyusunan Program Kerja Dinas sebagai informan, tentang Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan program penanganan kawasan kumuh di Kota Pekanbaru beliau mengatakan:

“Jelas ada prosedurnya masing-masing. Mana mungkin kita melaksanakan pekerjaan tidak ada 114 prosedurnya. SOP juga kita sudah jelas. Jadi disini memang kita dituntut untuk bekerja sesuai koridornya masing-masing. Untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana ini kurang lebih sama dengan kegiatan pembangunan lain. Ya pertama kita lakukan perencanaan dulu, kemudian dilakukan survey, kemudian kita siapkan masterplan dan DED nya itu seperti apa. (Wawancara November 21)

Selanjutnya peneliti mewawancarai Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Kota Pekanbaru sebagai informan, tentang anggaran yang diperlukan untuk menjalankan program kerja Dinas dalam menangani kawasan kumuh di Kota Pekanbaru ia mengatakan:

“Anggaran program RTLH itu dari APBD ada, DAK ada, Provinsi ada, yang jelas sumber dananya itu dari itu. Yang terpenting disini jangan sampai ada tumbukan atau double anggaran antara APBD dengan DAK misalnya. Untuk kendala mungkin keterbatasan anggaran, memang kan ini bertahap.”
(Wawancara November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui untuk anggaran untuk program Lokasi Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru tersebut berasal dari beberapa sumber, yaitu, APBD Kota, DAK, dan APBD Provinsi. Namun dalam pengelolaannya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dana APBD Kota dan DAK. Untuk APBD Provinsi dan bantuan dari pusat ada penanggung jawab sendiri yaitu dari provinsi.

Kemudian peneliti mewawancarai masyarakat yang tinggal dikawasan kumuh Kota Pekanbaru sebagai informan, tentang alasan dari Bapak/Ibu untuk tinggal di sekitar kawasan yang kurang higienis ini beliau mengatakan:

“Ya karena tidak ada pilihan lain, karena keterbatasan ekonomi yang membuat harus tinggal disini, daripada tidak ada tempat tinggal sama sekali kan (Wawancara, November 2021)

Selanjutnya peneliti mewawancarai masyarakat lain yang tinggal dikawasan kumuh Kota Pekanbaru sebagai informan 5, tentang berapa lama Bapak/Ibu untuk tinggal di sekitar kawasan yang kurang higienis ini beliau mengatakan:

“sudah lama dek, sudah puluhan tahun saya disini, dari anak kecil sekarang anak saya sudah besar. (Wawancara, November 2021)

Dan peneliti mewawancarai masyarakat yang tinggal dikawasan kumuh Kota Pekanbaru sebagai informan, tentang bisa bertahan hidup di kawasan yang dinilai kurang higienis ini beliau mengatakan:

“kenapa bisa bertahan karena memang tidak ada kemampuan untuk pindah ketempat lain, karena tempat lain biaya yang dikeluarkan lebih mahal, sementara kondisi ekonomi kami pas-pasan (Wawancara, November 2021)

Dari beberapa pernyataan yang telah dikemukakan oleh informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kurang terlaksananya program yang dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman khususnya dalam mengatasi pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru, hal ini dikarnakan penulis menemukan maish banyak lokasi kawasan padat penduduk yang masuk dalam kategori Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru, khususnya wilayah yang paling luas kawasan permukiman kumuhnya adalah di Kecamatan Senapelan.

b. Kualitas Pelayanan

Kualitas layanan, cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik pada kualitas. Berkenaan pelaksanaan program kerja Dinas Bidang Penanganan Kawasan Kumuh untuk mengatasi permasalahan di Kota Pekanbaru, maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Bidang Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekanbaru sebagai informan tentang dalam menjalankan program penanganan kawasan

kumuh di Kota Pekanbaru, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru ada melakukan kerja sama dengan pihak ke tiga, beliau mengatakan :

“Untuk meningkatkan program kerja, kegiatannya pembangunan fisik. Salah satu contohnya mck (kamar mandi dan toilet) yang harus diperbaiki. Kemudian atap rumah yang jebol yang harus dibantu. Kami melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengerjakannya untuk bisa diperbaiki agar rumah atau tempat tinggal mereka ditempati dengan nyaman.” (Wawancara November 21)

Berdasarkan informasi dari informan mengungkapkan bahwa salah satu program adalah pentaan dan pengendalian kawasan kumuh. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi tempat tinggal masyarakat dipermukiman kumuh agar memiliki tempat tinggal yang layak. Program pengembangan perumahan merupakan respon dari pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selaku penyelenggara dalam penataan permukiman kumuh di kota Pekanbaru.

Kemudian peneliti mewawancarai Kepala Subbag Penyusunan Program Kerja Dinas sebagai informan, tentang sepengetahuan Bapak/Ibu apakah pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada beliau mengatakan:

“Dalam menangani permasalahan permukiman kumuh disini kami mempunyai tanggung jawab sesesuai dengan tupoksi masing-masing, memannng terkadang

bisa tidak sesuai dengan dilapangan, hal ini tergantung situasi dan kondisi yang ada.. (Wawancara November 21)

Selanjutnya peneliti mewawancarai Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Kota Pekanbaru sebagai informan , tentang dalam tiga tahun terakhir apakah perumahan kumuh di Kota Pekanbaru jumlahnya sudah berkurang atau tidak ada kemajuan dengan berkurangnya jumlah pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru ia mengatakan :

“kalau dilihat dari data yang ada dalam tiga tahun terakhir perumahan kumuh sedikit berkurang, karena telah kami lakukan pembenahan agar rumah yang mereka huni lebih layak untuk ditempati.” (Wawancara November 2021)

Selanjutnya peneliti mewawancarai Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Kota Pekanbaru sebagai informan , tentang bagaimana dampak yang diberikan oleh pihak Dinas apakah program kerja bisa mengatasi ataupun mengurangi permukiman kumuh di Kota Pekanbaru ia mengatakan :

“dampak yang dapat dilihat dari program yang sedang kami jalankan bersifat jangka panjang, sehingga untuk saat ini tidak terlalu terlihat, yang jelas pemukiman kumuh sudah sedikit berkurang.” (Wawancara November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa program yang dijalankan sudah berjalan, akan tetapi belum mencapai target yang diinginkan oleh Dinas, karena target yang harus dicapai adalah membuat kota pekanbaru bebas dari pemukiman kumuh.

Kemudian peneliti mewawancarai masyarakat yang tinggal dikawasan kumuh Kota Pekanbaru sebagai informan , tentang program kerja Dinas Bidang

Penanganan Kawasan Kumuh di lapangan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan di Kota Pekanbaru yaitu permasalahan pemukiman kumuh yang ada di kawasan perkotaan beliau mengatakan:

“Kalau berbicara tentang program kerja terutama pelayanan kami sebagai penghuni cukup merasakan layanan yang bisa di katakan baik akan tetapi masih memiliki beberapa kekurangan seperti keteralabatan dalam menagani jika ada kendala yang di hadapi penghuni, seperti jika ada kedala mengenai air PDAM yang kurang mengalir dengan baik, kadang kami melakukan laporan kepada pihak pengelola tapi di tanggapinya itu lamabat mungkin kalau dari saya (Wawancara, November 2021)

Selanjutnya peneliti mewawancarai masyarakat lain yang tinggal dikawasan kumuh Kota Pekanbaru sebagai informan, tentang pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada beliau mengatakan:

“Terkait dengan pelaksanaan tugas yang sudah dilaksnaakan dinas perumahan sebagai pemerintah dalam hal ini dia berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, maksudnya bukan hanya untuk rumah layak huni saja tapi secara keseluruhan masyarakat yang ada dikota Pekanbaru, jadi dinas berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik sebagai pelayan. (Wawancara, November 2021)

Dan peneliti mewawancarai masyarakat yang tinggal dikawasan kumuh Kota Pekanbaru sebagai informan, tentang bagaimana dampak yang diberikan oleh

pihak Dinas apakah program kerja dalam mengurangi permukiman kumuh di Kota Pekanbaru bisa mengatasi pemukiman kumuh ini beliau mengatakan:

“saya liat dampak yang dapat dirasakan dari program dalam mengurangi pemukiman kumuh belum terlihat, terutama pada saat musim penghujan, karena pemukiman ini jadi kumuh karena drainase air yang kurang baik sehingga kondisi tidak begitu baik (Wawancara, November 2021)

Dan peneliti mewawancarai masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh Kota Pekanbaru sebagai informan, tentang pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru ada menyediakan media untuk mendengarkan keluhan ataupun masukan dari masyarakat terkait permukiman kumuh beliau mengatakan:

“saya selaku penghuni tentu bisa di katakan nyamanlah karena sudah diberikan fasilitas yang cukup memadai, tapi klo bicara soal kualitas pelayanan pengelola kami kadang masih mendapat kendala klo mau ketemu sam ketuanya karna biasa susah di temui kalo ada kendalanya kami sebagai penghuni (Wawancara, November 2021)

Dari beberapa pernyataan yang telah dikemukakan oleh informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan belum terlalu optimal, karena masih banyak program-program yang terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang telah ditentukan.

c. Responsivitas,

Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan

program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berkenaan pelaksanaan program kerja Dinas Bidang Penanganan Kawasan Kumuh untuk mengatasi permasalahan di Kota Pekanbaru, maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Bidang Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekanbaru sebagai informan tentang Apakah pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru ada menyediakan media untuk mendengarkan keluhan ataupun masukan dari masyarakat terkait pemukiman kumuh?, beliau mengatakan :

“media khusus yang disediakan untuk menangani atau mendengarkan keluhan dari masyarakat terkait pemukiman kumuh tidak ada, karena pada saat ini kami langsung turun kelapangan untuk mendapatkan info apa saja keluhan yang dirasakan oleh masyarakat” (Wawancara November 21)

Berdasarkan informasi dari informan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa media untuk masyarakat menyampaikan setiap keluhan yang ada pada masyarakat, sehingga mereka merasa kesulitan untuk menyampaikan keluhan yang ada di lapangan.

Kemudian peneliti mewawancarai Kepala Subbag Penyusunan Program Kerja Dinas sebagai informan, tentang Tindakan seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru agar pemukiman kumuh tidak berkembang dengan pesat dan cepat teratasi? beliau mengatakan:

“Dalam menangani permasalahan permukiman kumuh disini kami selalu melakukan pengawasan secara langsung dilapangam, sehingga dapat melihat langsung daerah mana yang banyak pemukiman kumuh, gterutama pada saat musim penghujan. (Wawancara November 21)

Kemudian peneliti mewawancarai masyarakat yang tinggal dikawasan kumuh Kota Pekanbaru sebagai informan , tentang Tindakan seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru agar pemukiman kumuh tidak berkembang dengan pesat dan cepat teratasi? beliau mengatakan:

“Ya menurut saya ya lokasi pemukiman warga harus di buat saluran drainase yang lancar, selain itu sebelum melaukan pembangunan pemukiman hendaknya di kaji terlebih dahulu apakah daerah yang akan dibangun rawan banjir pa tidak (Wawancara, November 2021)

Dari beberapa pernyataan yang telah dikemukakan oleh informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Responsivitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman bisa dinilai kurang baik terhadap situasi yang terjadi di Kota Pekanbaru, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya luas Kawasan Kumuh yang ada di Kota Pekanbaru mencapai 113,56 Ha yang terbagi menjadi 5 (lima) kawasan kumuh di masing-masing daerah.

d. Responsibilitas.

Responsibilitas, yaitu menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan kebijakan birokrasi baik yang eksplisit maupun yang implisit.

Berkenaan pelaksanaan program kerja Dinas Bidang Penanganan Kawasan Kumuh untuk mengatasi permasalahan di Kota Pekanbaru, maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Bidang Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekanbaru sebagai informan tentang Apakah pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru ada melakukan pendataan terhadap lokasi atau wilayah di Kota Pekanbaru yang masih terdapat pemukiman kumuh, beliau mengatakan :

“Untuk pelaksanaan program ini, pertama dilakukan pendataan dulu. Kemudian survey ke lokasi yang dilakukan tenaga fasilitator lapangan (TFL). Dilihat itu data sesuai tidak dengan fakta dilapangan. Kemudian ada bagian evaluasi. Setelah itu baru mulai persiapan pelaksanaan. Mulai dari pembentukan kelompok penerima bantuan dengan ditunjuk salah satu koordinatornya. KPB tersebut nantinya bertanggung jawab kepada kelompok kerja (Pokja) itu diambil dari kelurahan. Jelas itu ada SOP nya yang mengatur tiap masingmasing bagian.” (Wawancara November 21)

Kemudian peneliti mewawancarai Kepala Subbag Penyusunan Program Kerja Dinas sebagai informan, tentang Apakah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru ada melakukan evaluasi terhadap kinerjanya dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Pekanbaru beliau mengatakan:

“kami selalu melakukan evaluasi atas pelaksanaan program yang telah kami buat setiap tahunnya, meskipun begitu terkadang permasalahan yang dihadapi setiap tahun berbeda-beda sehingga membuat kami mengalami kesulitan

mengambil langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut.

(Wawancara November 21)

Selanjutnya peneliti mewawancarai Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Kota Pekanbaru sebagai informan, tentang berapa kali dilakukannya evaluasi oleh pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru setelah dilakukannya tugas di lapangan ia mengatakan :

“kami melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pertriwulan, karena dengan begitu diharapkan evaluasi yang dilakukan dapat menyiesiakan dengan kondisi dilapangan.” (Wawancara November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu tercapainya pelaksanaan program yang telah dibuat, maka dinas terkait selalu melakukan evaluasi atas pelaksanaan program yang sedang berjalan, meskipun begitu terkadang mendapatkan kendala yang membuat program tidak berjalan dengan maksimal.

Kemudian peneliti mewawancarai masyarakat yang tinggal dikawasan kumuh Kota Pekanbaru sebagai informan , tentang pernah meilihat pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru ada melakukan pendataan terhadap lokasi atau wilayah di Kota Pekanbaru yang masih terdapat pemukiman kumuh beliau mengatakan:

“Ya saya pernah melihat sesekali, akan tetapi setelah melakukan pendataan, tindakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan tergolong sangat lama dalam menentukan sikap (Wawancara, November 2021)

Selanjutnya peneliti mewawancarai masyarakat lain yang tinggal dikawasan kumuh Kota Pekanbaru sebagai informan , tentang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru ada melakukan evaluasi terhadap kinerjanya dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Pekanbaru beliau mengatakan:

“kalau untuk hal ini sepertinya tidak begitu terlihat, karena tidak begitu banyak perubahan yang tampak, terutama dalam hal penanganan keluhan yang sering disampaikan oleh masyarakat. (Wawancara, November 2021)

Kemudian peneliti mewawancarai masyarakat yang tinggal dikawasan kumuh Kota Pekanbaru sebagai informan , tentang Apakah ada dilakunnya relokasi atau penggusuran terhadap pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru ini beliau mengatakan:

“kalau kondisi seperti ini terus, tentu akan terjadi penggusuran oleh pihak terkait, kami sebagai warga disini mengharapkan diberikan tempat yang lebih baik apabila terjadi penggusuran (Wawancara, November 2021)

Dan peneliti mewawancarai masyarakat yang tinggal dikawasan kumuh Kota Pekanbaru sebagai informan , tentang ada dilakukannya pemberian tindakan sanksi kepada masyarakat yang mendirikan bangunan illegal ini beliau mengatakan:

“jelas adalah dek, sanksi yang diberikan, akan tetapi karena kondisi kami terpaksa melakukannya, mau tidak mau ya harus dilakukan, daripada tidak ada tempat tinggal sama sekali, nanti kami harus tinggal dimana (Wawancara, November 2021)

Dari beberapa pernyataan yang telah dikemukakan oleh informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak berjalannya responsibilitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam melakukan tindakan pencegahan terkait perkembangan rumah kumuh, sehingga permukiman rumah kumuh semakin berkembang dan meluas, padahal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman telah menargetkan pembebasan Kota Pekanbaru dari permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh sejak tahun 2016, tetapi realisasi sampai pada tahun ini belum berjalan sesuai dengan apa yang telah menjadi target tersebut.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas, maksudnya bahwa seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi tunduk kepada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, dimana para pejabat politik tersebut dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan rakyat. Berkenaan pelaksanaan program kerja Dinas Bidang Penanganan Kawasan Kumuh untuk mengatasi permasalahan di Kota Pekanbaru, maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Bidang Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekanbaru sebagai informan tentang Apakah ada dilakunnya relokasi atau pengusuran terhadap pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan:

“wacananya kedepan pekanbaru akan bebas dari wilayah pemukiman kumuh, tentu akan ada pengusuran, akan tetapi memerlukan waktu untuk melakukan itu, karena kami juga tentu harus memikirkan kemana warga yang di gusur

harus direlokasi ketempat yang tentunya tidak kumuh dan layak untuk ditempati.” (Wawancara November 21)

Berdasarkan informasi dari informan 1 mengungkapkan bahwa salah satu program dinas adalah pentaan dan pengendalian kawasan kumuh. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi tempat tinggal masyarakat dipermukiman kumuh agar memiliki tempat tinggal yang layak.

Kemudian peneliti mewawancarai Kepala Subbag Penyusunan Program Kerja Dinas sebagai informan, tentang Apakah ada dilakukannya pemberian tindakan sanksi kepada masyarakat yang mendirikan bangunan illegal beliau mengatakan:

“setelah dilakukan pengusuran, apabila masih didapati masyarakat yang masih bandel untuk tetap mendirikan bangunan diwilayah tersebut, tentu akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan (Wawancara November 21)

Kemudian peneliti mewawancarai masyarakat yang tinggal dikawasan kumuh Kota Pekanbaru sebagai informan, tentang Apakah pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru menyediakan tempat relokasi yang lebih aman dan nyaman beliau mengatakan:

“Ya katanya kami akan direlokasi ketempat yang lebih layak, akan tetapi sampai saat ini tidak ada diberikan tempat kepada kami yang lebih layak dan nyaman untuk ditempati (Wawancara, November 2021)

Selanjutnya peneliti mewawancarai masyarakat lain yang tinggal dikawasan kumuh Kota Pekanbaru sebagai informan, tentang Apakah ada dilakukannya ganti rugi yang diberikan oleh pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kota Pekanbaru apabila ada dilakukannya pengrusakan pemukiman rakyat beliau mengatakan:

“sudah tentu ada penggantian atas kerugian yang diterima oleh masyarakat, akan tetapi ganti rugi yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan harapan, bahkan cenderung merugikan karena tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan. (Wawancara, November 2021)

Dari beberapa pernyataan yang telah dikemukakan oleh informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kurang terlaksananya program yang dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman khususnya dalam mengatasi pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru, hal ini dikarenakan penulis menemukan masih banyak lokasi kawasan padat penduduk yang masuk dalam kategori Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru, khususnya wilayah yang paling luas kawasan permukiman kumuhnya adalah di Kecamatan Senapelan.

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru

Adapun hambatan-hambatan yang dialami Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh yaitu adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi merupakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai program absensi berbasis elektronik, yang memberikan informasi dan pengetahuan kepada pegawai, sehingga masih banyak pegawai yang ditemui dilapangan melanggar aturan yang telah dibuat.

2. Kedua kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk petugas dilapangan, seperti kendaraan operasional yang masih sedikit, sehingga kebijakan yang telah dibuat tidak terimplementasi secara baik.
3. Faktor penghambat yang terakhir yaitu anggaran yang terbatas sehingga membuat program yang dibuat tidak terlaksana dengan maksimal.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan oleh peneliti, maka kesimpulannya adalah:

1. Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik, ini dikarenakan penulis menemukan masih banyak lokasi kawasan padat penduduk yang masuk dalam kategori Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru.
2. Kendala yang dialami Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh yaitu adalah sebagai berikut: Sosialisasi merupakan kegiatan penyuluhan. Kedua kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk petugas dilapangan. Dan Faktor penghambat yang terakhir yaitu anggaran yang terbatas sehingga membuat program yang dibuat tidak terlaksana dengan maksimal.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah

1. Bagi pemerintah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pekanbaru hendaknya lebih aktif dalam monitoring Program Kota Tanpa Kumuh untuk melihat pengelolaan sarana dan prasarana Program Kota Tanpa Kumuh. Sedangkan bagi masyarakat, masyarakat harus bisa menggunakan dana dari pemerintah dengan bijak untuk pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh.

2. Diharapkan kepada masyarakat terutama Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru untuk dapat selalu menjaga lingkungan sekitar dengan sebaik-baiknya setelah dilakukannya perbaikan dan pembangunan di kelurahan tersebut agar tidak lagi menjadi salah satu kriteria permukiman kumuh.
3. Bagi peneliti diharapkan hasil penelitian ini menjadi sebuah bahan tambahan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- AG, Subarsono. 2012. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan
- Creswell, Jhon W. 2016. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Hanim, Sufian. 2005, Organisasi Dan Manajemen. Perpustakaan Nasional; Katalog Dalam Terbitan (KDT)
- Islamy, Irfan. 2009. Prinsip- prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara: Jakarta.
- Ismail, Nawawi. 2013. Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana.
- Kusdi. 2011. Budaya Organisasi. Jakarta: Salemba Empat
- Malayu S. P. Hasibuan. 2010. Organisasidan Motivasi. Jakarta, Bumi Aksara
- Mulyono. 2016, Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan. Jakarta, Ar-Ruzz Media.
- Munaf Yusri. 2016. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Ndraha, Taliziduhu. 2003, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif.2011, Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Erlangga, Jakarta
- Pasolong, Harbani. 2010, Teori Administrasi Publik. Bandung, Alfabeta
- Pidarta, Made. 2004, Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Sedarmayanti, 2004, Good Government (Pemerintahan yang baik); Bandung: CV. Mandar Maju.

- Sedarmayanti. 2003. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Penerbit Ilham Jaya
- Siagian, P. Sondang. 2006. Filsafat Administrasi, Jakarta. Bumi Askara. 2004. Teori Pengembangan Organisasi, Jakarta. Bumi Askara.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabeta.
- Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2015. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahab, Abdul , Solichin. 2008. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus. CAPS. Yogyakarta.
- Yussa Tarmizi & Andry Hendry, 2015. Perilaku Etika Administrasi Publik, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh
- Zulkifli, 2009. fungsi-fungsi manajemen. Pekanbaru. UIR Press.
- Zulkifli. 2005, Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen, Pekanbaru, UIR Press.
- Zulkifli. 2013. Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa. Pekanbaru: Badan Penerbit Fisipol UIR.

B. Dokumentasi Penelitian

- Keputusan Walikota Pekanbaru No 878 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru No 151 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru.
- Peraturan Wali Kota Pekanbaru No. 95 Tahun 2016, Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru.